



PENGARUH TEKANAN INTERNASIONAL TERHADAP KEBIJAKAN INDONESIA ATAS HAK ASASI MANUSIA

S K R I P S I

Ditajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI)
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Asal	Halaman	Klass
Terima Tgl : 08 MAR 2002	08 MAR 2002	323.4
Oleh : No. Induk : 0551	KLASIR / PENYALIN :	MUG p.c.1

A. Ananto Nugroho

970910101185

Dosen Pembimbing

Abubakar Eby Hara, PhD

NIP. 131 833 004

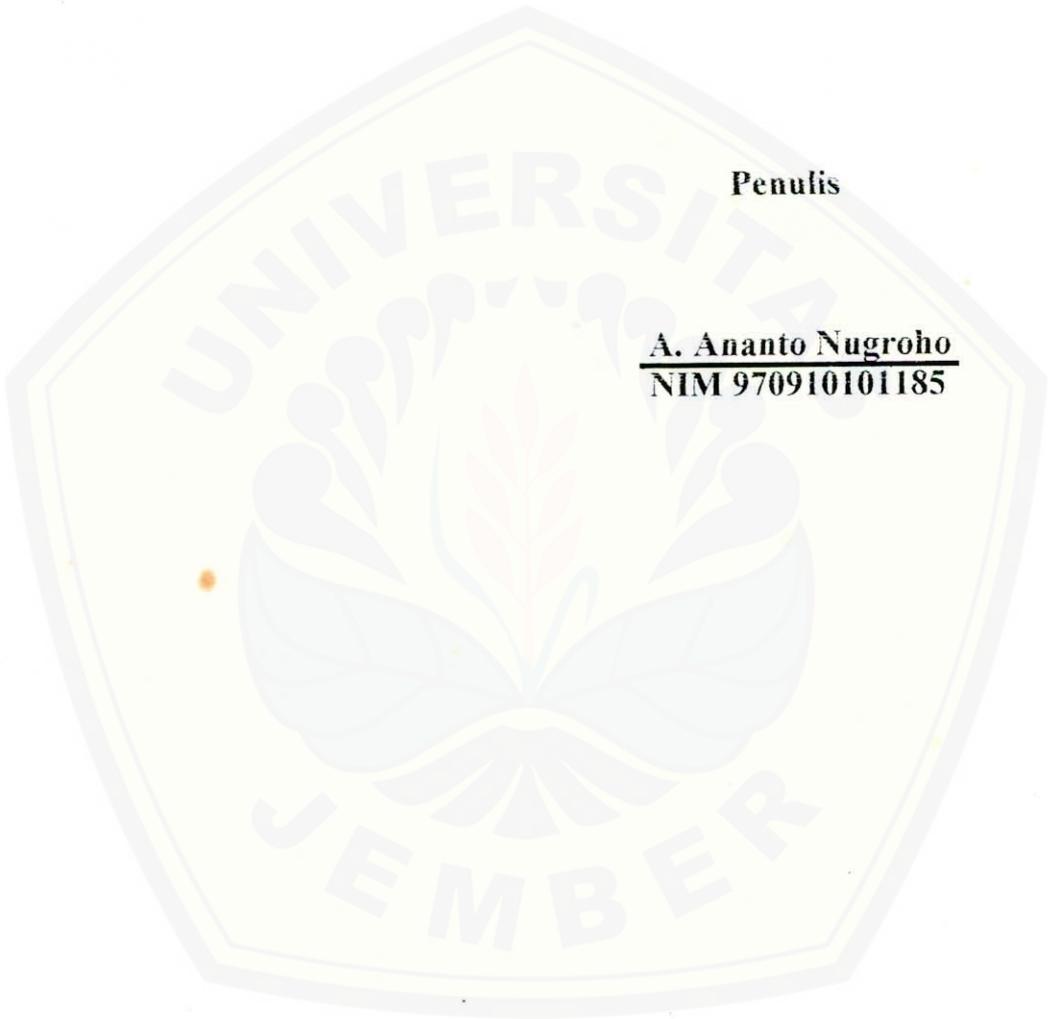
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

2002

**Saya menyatakan bahwa
skripsi ini adalah hasil karya asli saya sendiri
dan semua bahan yang digunakan adalah berasal dari
sumber yang sah dan diketahui.**

Penulis

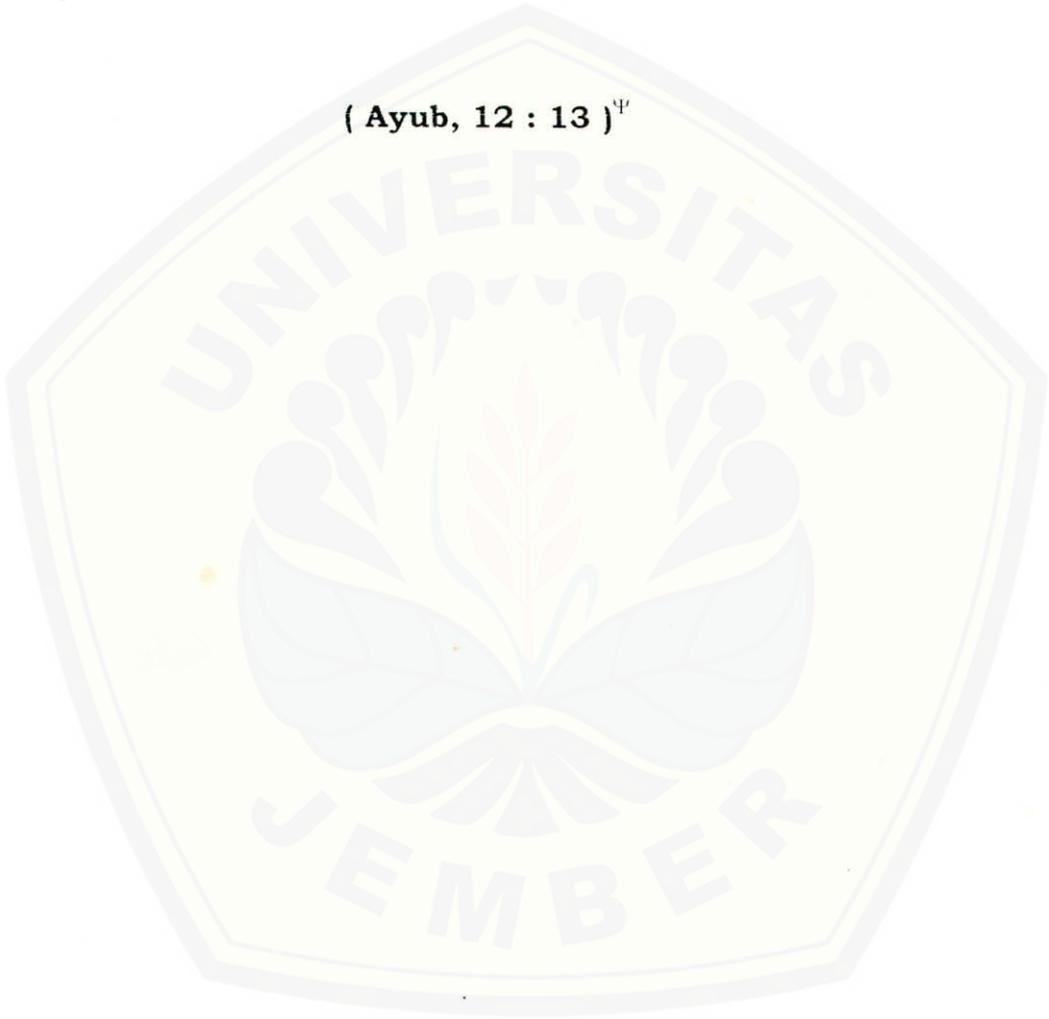
A. Ananto Nugroho
NIM 970910101185



MOTTO :

**Tetapi pada Allahlah hikmat dan kekuatan, Dialah yang mempunyai
pertimbangan dan pengertian**

(Ayub, 12 : 13)[¶]



[¶] *Alkitab*, (Jakarta : Lembaga Alkitab Indonesia, 1980), hal 575.

Pengesahan

Diterima dan dipertahankan di depan tim penguji skripsi
guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

Strata Satu (S1)

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Program Studi Hubungan Internasional

Pada

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Pada Hari : Senin

Tanggal : 4 Februari 2002

Pukul : 08.00 WIB

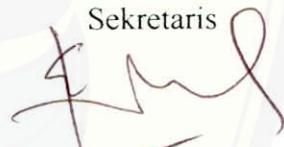
Panitia Penguji

Ketua



Drs. Nurrudin M. Yasin
NIP. 130 518 486

Sekretaris



Abubakar Eby Hara, PhD
NIP. 131 833 004

Susunan Anggota Penguji

1. Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A
2. Dra. Sri Yuniati, MSI

1. 
2. 

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Yesus Kristus
2. Keluargaku yang selalu mendukung dan mendampingi dalam setiap usaha dan doa.
3. Almamater dan Masyarakat Indonesia.



KATA PENGANTAR

Pertolongan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Kuasa telah membawa penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang mengambil judul **“Pengaruh Tekanan Internasional Terhadap Kebijakan Indonesia Atas Hak Asasi Manusia”**. Oleh sebab itu, kiranya ucapan syukur dan puji patut dipersembahkan atas segala yang telah diberikannya.

Selesainya penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik secara materiil maupun spirituil yang telah diterima oleh penulis. Karena itu merupakan sebuah hal yang harus dilakukan untuk mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang diterima penulis kepada :

1. Bapak A. Eby Hara, PhD. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan pikiran dan waktunya yang padat hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. A. Khusyairi, M.A selaku dosen wali yang terus memberikan dorongan dan semangat selama menjalani studi di Jember.
3. Drs. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Drs. Sjoekron Sjah, S.U selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Semua dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terutama jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan arahan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna.

6. Bapak F. Sus Haryanto dan Ibu C. Andari yang telah mencurahkan banyak tenaga, perhatian dan kasihnya sehingga selalu memotivasi penulis dalam hidup.
7. Kakakku L. Dyah Damayanti dan adikku Ign. Whisnu Adi Nugroho yang telah banyak memberikan dukungan dan warna dalam perjalanan hidup.
8. Debora Kurnia A.K yang selalu menyemangati dan memberikan dorongan selama ini, terima kasih atas perhatian, kasih dan doa yang telah diberikan.
9. Keluarga Bapak Yusuf Kusuma di Magelang yang selalu dapat menerima dan mendukung penulis.
10. Keluarga Bapak Agus Sriyono di Lisbon yang telah bermurah hati membantu sejak awal penulisan skripsi ini.
11. Keluarga Bapak Sahadi, yang telah memberikan banyak pelajaran dan bimbingan dalam menghadapi dan memahami hidup.
12. Keluarga Bapak Rafael Purtomo yang dengan sabar dan penuh kerendahan hati banyak memberikan nasehat dan masukan sehingga menjadi inspirator dalam menjalani kehidupan.
13. Segenap keluarga besar SDK Maria Fatima II Jember yang telah menjadi penghibur selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Segenap Pengurus Pusat PMKRI Sanctus Thomas Aquinas di Jakarta, Mas Edi, Robert, Budi dan rekan – rekan yang lain yang selalu menyediakan tempat guna penelitian selama di Jakarta.
15. Teman – teman HI 97 (Andhika, Oye, Pooh, Rina, Bangun, Novi, Bowo, Imam, Emon dkk).
16. Rekan – rekan di PMKRI Cabang Jember – Sanctus Albertus yang telah memberikan banyak pengalaman dan dialektika. Just make the best team, guys.

17. Teman – teman di MPA. MAPALUS, *thank's for the gretest adventures and nice friendships.*
18. Arek – arek Marga (Erpunk, Akri, Genthoo, Jossie, Didit, Kios, Gondrong), *we are the best familiy, aren't we.*
19. Buat Pramanu, Henny, Winda, Nana, Sisil, Emil, Ari, Frangky, Ria, Deny, dkk, *thanks for your support and understanding.*
20. Buat Simbaku yang selalu menemani setiap kali lembur.

Masih banyak kiranya bantuan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kiranya semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Yang Maha Kuasa.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih sangatjauh dari sempurna, karena itu dengan kerendahan hati dan tangan terbuka mengharapakan kritik dan yang berguna demi kesempurnaan skripsi ini selanjutnnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang memerlukannya.

Jember, Januari 2001

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xi
BAB I : Pendahuluan	
I.1 Alasan Pemilihan Judul	1
I.2 Ruang Lingkup Pembahasan	4
I.3 Problematika	6
I.4 Kerangka Dasar Teori	6
I.5 Hipotesa	11
I.6 Metode	12
I.7 Pendekatan	13
BAB II : Sikap Indonesia Atas Hak Asasi Manusia	
III.1 Konsep HAM menurut Indonesia	16
III.2 Diplomasi dan Sosialisasi HAM Indonesia	23

III.3 Respon Indonesia Terhadap Tekanan Internasional Atas Pelaksanaan HAM di Indonesia	26
--	-----------

BAB III : Gambaran Kekuatan Indonesia

III.1 Kekuatan Politik.....	32
III.2 Kekuatan Ekonomi.....	38
III.2.1 Gross National Product per Kapita	39
III.2.2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	42
III.2.3 Ketergantungan Ekonomi Indonesia pada Dunia	45
III.3 Kekuatan Militer	51
III.3.1 Kuantitas dan Kualitas Tentara	52
III.3.2 Penguasaan Teknologi Militer	56
III.3.3 Ketergantungan Militer Indonesia pada Bantuan Asing	60

BAB IV : Pengaruh Tekanan Internasional Terhadap Kebijakan Indonesia Atas HAM Masa Soeharto

IV.1 Tekanan Internasional Atas Pelaksanaan HAM Indonesia	66
IV.1.1 Tekanan Ekonomi dan pengaruhnya	67
IV.1.2 Tekanan Militer dan pengaruhnya	73
IV.2 Hasil Tekanan Internasional.....	76
IV.2.1 Pendirian Komnas HAM sebagai lembaga pengawas HAM.....	77
IV.2.2 Pembuatan Peraturan dan Perundang – Undangn	80
IV.2.3 Pembentukan Tim Penyelidik Pelanggaran HAM	83

BAB V : Kesimpulan.....	85
--------------------------------	-----------

Daftar Pustaka	87
-----------------------------	-----------

Lampiran

DAFTAR TABEL

		halaman
Tabel 1	: GNP per Kapita Indonesia Tahun 1990 – 1998	40
Tabel 2	: Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1990 – 1998	43
Tabel 3	: Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara	44
Tabel 4	: Tingkat Inflasi Negara – Negara ASEAN	45
Tabel 5	: Data Pembiayaan Pengeluaran Pembangunan 1990/1991 – 1998/1999..	48
Tabel 6	: Jumlah Hutang Luar Negeri Indonesia	49
Tabel 7	: Defisit Neraca Perdagangan Indonesia di Beberapa Negara Tujuan	50
Tabel 8	: Jumlah Tentara yang Dimiliki Indonesia Tahun 1990 – 1998	53
Tabel 9	: Jumlah Biaya Pembelanjaan Militer Indonesia Tahun 1991 – 1997	63
Tabel 10	: 30 Negara Dengan Biaya Belanja Militer Terbesar	64



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Alasan Pemilihan Judul

Saat ini hak asasi manusia merupakan sesuatu hal yang menjadi pusat perhatian dunia. Kecenderungan ini diawali pada tanggal 10 Desember 1948, Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional terbesar mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Munculnya DUHAM merupakan tonggak utama dalam menginternasionalisasikan isu hak asasi manusia. Berbagai perdebatan panjang HAM telah mengawali proses lahirnya HAM. Perdebatan ini dibuktikan dengan keluarnya Deklarasi Perserikatan Bangsa – Bangsa pada 1 Januari 1942 oleh negara sekutu yang saat itu sedang berperang melawan pasukan Jepang, Jerman dan Italia, menyatakan bahwa kemenangan dalam peperangan merupakan hal terpenting dalam menjamin kehidupan masyarakat, kebebasan, dan mempertahankan hak asasi manusia¹ hingga keluarnya DUHAM. Namun perjalanan panjang kembali harus dijalani dalam menghasilkan Kovenan turunan dari DUHAM. Pada tahun 1952 PBB membentuk Komisi Hak Asasi Manusia yang berada di bawah Komisi Sosial dan Ekonomi PBB. Pada tanggal 16 Desember 1966, Majelis Umum PBB menyetujui kodifikasi aturan turunan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yaitu kovenan atas Hak Sipil dan Politik serta Kovenan atas Hak Sosial, Ekonomi dan Budaya. Sekalipun demikian aturan ini tidak mampu dioperasionalisasikan karena dirasa ada banyak kekurangan. Baru pada tanggal 3 Januari 1976 Kovenan Sosial berhasil memenuhi persyaratan pelaksanaan. Pada tahun yang sama, tepatnya 23 Maret 1976 Kovenan Hak Sipil dan Politik memenuhi syarat pelaksanaan. Jadi mulai dari kodifikasi sampai ratifikasi

¹ James W. Nickel, Titis Edy Arini (penerjemah) *Hak Asasi Manusia, Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 1996), hal 1.

memakan waktu 10 tahun.² Isu HAM terus berkembang hingga saat ini yang ditandai dengan munculnya KTT HAM di Wina, Austria pada tahun 1993 yang diikuti oleh hampir seluruh negara di dunia. KTT ini dianggap sebagai tempat bersatunya berbagai perdebatan penafsiran tentang HAM selama ini.

Melihat arus besar pergeseran isu internasional tersebut Indonesia juga mencoba membuat berbagai respon antara lain dengan keikutsertaannya sebagai anggota Komisi HAM di PBB. Namun sekalipun demikian upaya Indonesia merespon isu HAM dengan meratifikasi beberapa kovenan hak asasi manusia sendiri sebenarnya bisa dibilang sangat terlambat dibandingkan negara – negara dunia ketiga lainnya yang telah meratifikasi kovenan – kovenan tentang HAM. Secara kuantitas sendiri Indonesia juga baru meratifikasi 6 kovenan HAM dari sekian banyak kovenan yang telah disepakati oleh Majelis Umum PBB. Dalam *Human Development Report* tahun 1991 yang disusun oleh *United Nation Development Agency*, Indonesia ditempatkan pada ranking 77 dari 88 negara dengan angka 5 pada skala 0 – 40³. Indonesia ditempatkan bersama – sama dengan Korea Utara, Kuba dan Vietnam. Hal ini karena kondisi di Indonesia masih sangat rawan terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dibuktikan dengan berbagai tindak kekerasan aparat pemerintah di beberapa daerah seperti di Aceh, Timor – Timur dan Irian Jaya.

Perkembangan isu HAM yang semakin dominan itu, mengharuskan Indonesia membuat strategi baru dalam praktek hubungan luar negerinya. Hal ini disebabkan karena mulai dikaitkannya isu tentang HAM dalam berbagai bidang kerjasama antar negara. Bahkan beberapa negara di Eropa mulai mencantumkan secara eksplisit tentang orientasi kebijakan

² Sandra Kartika dan Supto Yunus, *Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, panduan bagi Jurnalis* (Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan 2000), hal 6.

³ Mirriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia , Demokrasi Parleментар dan Demokrasi Pancasila* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1996)., hal 176

luar negeri yang tetap menjunjung tinggi HAM. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi perhatian negara – negara di dunia sehubungan dengan dinilai buruknya penegakan HAM yang menyebabkan terganggunya kerjasama dengan negara lain.. Peran bantuan luar negeri yang tercatat mencapai angka diatas 50 % pada Pelita I dan Pelita II⁴ dan 35 % pada tahun 1993 membuat Indonesia harus berusaha mencegah dikaitkannya bantuan tersebut dengan kondisi HAM Indonesia. Ketergantungan yang demikian besar tersebut tentu saja akan sangat mengganggu Indonesia apabila mulai dikaitkan dengan pandangan negara – negara donatur atas pelanggaran HAM di Indonesia. Di samping ketergantungan ekonomi secara militerpun, Indonesia masih memerlukan bantuan berbagai suku cadang pesawat dan senjata pada negara lain. Pada akhirnya ini membuat Indonesia harus berhati – hati dalam pelaksanaan diplomasi HAMnya.

Tekanan internasional pada akhirnya sangat berpengaruh dalam kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia. Hal ini terlihat jelas mulai tahun 1991 dimana isu tentang HAM mulai dominan yang akhirnya mengakibatkan banyak tekanan bagi Indonesia atas pelanggaran HAM yang dilakukannya. Sebagai contoh, pada tahun 1991 ketika terjadi tragedi Santa Cruz di Timor – timur, Indonesia pada akhirnya mengambil kebijakan untuk membentuk tim pencari fakta guna mengusut peristiwa tersebut. Akhirnya 2 perwira dianggap bertanggung jawab dan dipecat. Tekanan – tekanan yang tak kunjung reda akibat pelanggaran HAM di Aceh dan Irian Jaya juga membuat Indonesia harus membentuk Komisi Nasional HAM pada 7 Juni 1993 dengan Keppres No 50 tahun 1993 guna meyakinkan dunia internasional atas komitmennya dalam penegakan HAM. Contoh lain yang sangat jelas terlihat adalah ketika Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja tanggal 20 Desember 1993 dan pencabutan Ketentuan Menteri Tenaga Kerja nomor 342 tahun 1986 pada

⁴ Mudrajad Kuncoro, *Indonesia Menjelang Tahun 2000, Sebuah Remungan, Analisis CSIS tahun XXII / no2* Maret – April 1993 (Jakarta : Center for Strategic and International Studies, 1993)., hal|116.

15 Januari 1994 akibat ancaman pencabutan fasilitas *Generalized System of Preferences* (GSP) oleh Amerika akibat kondisi buruh di Indonesia yang dirasakan sangat buruk.

Keadaan tersebut di atas sangat berbeda dengan berbagai kejadian pelanggaran HAM sebelum tahun 1991. Munculnya berbagai tragedi seperti Peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965 yang menewaskan ratusan ribu orang, peristiwa Tanjung Priok, Malapetaka 15 Januari (Malari) serta berbagai kekerasan di Aceh dan Irian Jaya hampir tidak pernah digubris oleh pemerintah Indonesia. Tidak ada kebijakan apapun yang diambil dalam mengusut kasus pelanggaran HAM tersebut. Hal ini dilatar belakangi oleh tidak adanya tekanan internasional akibat isu –isu tentang ideologi yang lebih dominan.

Berdasarkan paparan di atas, maka judul yang diambil oleh penulis adalah **“Pengaruh Tekanan Internasional Terhadap Kebijakan Indonesia Atas HAM ”**.

I.2. Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam sebuah karya ilmiah, fokus bahasan perlu dijelaskan secara terperinci. Hal ini diperlukan untuk menghindari munculnya pembiasan dari inti pembahasan dari permasalahan yang ada. Munculnya pembiasan ini sangat mengurangi bobot bahasan dan analisa dalam sebuah karya tulis ilmiah. Ruang lingkup pembahasan juga akan mempermudah penajaman atas analisa yang dilakukan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kartini Kartono:

“Pembatasan masalah sangat berkaitan dengan adanya limit perongkasan, sempitnya waktu, terbatasnya tenaga dan kemampuan intelektual guna menyelidiki semua interrelasi persoalan”⁵

Berdasarkan deskripsi diatas, maka penulis dalam karya ilmiah ini menggunakan batasan – batasan materi dan waktu. Batasan materi mencakup ruang lingkup, wilayah dan gejala – gejala yang muncul dari permasalahan. Oleh karena itu, batasan materi yang diambil

⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Jakarta : C.V Rajawali Press.1981) hal 55.

oleh penulis adalah pengaruh tekanan internasional terhadap kebijakan Indonesia atas HAM. Dalam hal ini akan dilihat tekanan internasional atas Indonesia dengan menggunakan kekuatan – kekuatan yang dimiliki yaitu politik, ekonomi, maupun militer yang menggunakan isu hak asasi manusia. Di samping itu tekanan yang dimaksudkan adalah tekanan yang dilakukan oleh beberapa organisasi internasional yaitu IGGI dan IMF serta beberapa negara barat seperti Belanda, Amerika, Jerman serta Inggris. Tekanan – tekanan itu akan direspon Indonesia dengan berbagai kebijakan yang dibuat baik di dalam maupun di luar negeri.

Kurun waktu pembahasan dalam karya ilmiah ini yaitu pada masa pemerintahan Soeharto mulai tahun 1991 ketika perang dingin dianggap telah berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet dimana disusul dengan munculnya isu – isu tentang hak asasi manusia mulai mengemuka dan menonjol dalam hubungan internasional serta saat dimana Indonesia pertama kali memiliki badan pengawas HAM di bawah departemen luar negeri sampai tahun 1998 ketika Soeharto turun dari jabatan presiden. Dalam rentang waktu tersebut Indonesia mengalami tekanan – tekanan atas berbagai insiden pelanggaran HAM seperti di Timor – Timur tahun 1991 dan Irian Jaya (sekarang Papua) sampai dengan krisis ekonomi tahun 1997 yang disusul kekacauan politik dimana banyak kerusuhan yang bersifat rasial sampai penculikan aktivis gerakan tahun 1998 ketika Soeharto dipaksa turun dari jabatan presiden.

Walaupun penulis sudah menetapkan ruang lingkup pembahasan, namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk memasukkan berbagai variabel serta fenomena yang terjadi di luar ruang lingkup yang sudah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan secara lebih terperinci dan komprehensif. Dengan demikian fenomena di luar lingkup pembahasan merupakan sebuah latar belakang dan penjas bagi analisa yang dilakukan.

I.3. Problematika

Sebuah karya ilmiah dituntut untuk dapat memaparkan hal yang menjadi pokok permasalahan. Sumadi Suryabrata mengungkapkan bahwa:

“Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (gap) antara das Sollen dan das Sein, ada perbedaan antara yang seharusnya dengan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dengan apa tersedia, antara harapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengan itu”⁶

Sedangkan menurut **Suharsini Arikunto** :

“Agar penelitian dapat dilaksanakan sebaik – baiknya, maka peneliti harus merumuskan masalahnya sehingga jelas darimana harus mulai, kemana harus pergi dan dengan apa”⁷

Dari dua penjelasan di atas, bisa dilihat betapa pentingnya perumusan masalah dalam sebuah karya ilmiah. Secara ringkas yang dimaksud dengan permasalahan adalah suatu titik pijakan awal bagi sebuah penelitian dimana muncul das sollen dan das sein.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mencoba memfokuskan permasalahan pada pelaksanaan politik luar negeri Indonesia atas HAM dalam upaya peningkatan kekuatan nasional yaitu **sejauh mana tekanan internasional mempengaruhi kebijakan Indonesia atas H.A.M masa pemerintahan Soeharto ?**

I.4. Kerangka Dasar Teori

Apabila fokus permasalahan sudah tersusun, maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengupayakan pemecahan sementara atas masalah yang ada. Dalam upaya memecahkan permasalahan tersebut kita memerlukan sebuah panduan yang dapat digunakan untuk lebih mendekati kebenaran dimana panduan tersebut berwujud proposisi - proposisi

⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : C.V Rajawali, 1983), hal 66.

⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1989) hal 17.

teoritik. Menurut Mochtar Masoed⁸ terdapat beberapa proposisi teoritik yang memiliki kadar teoritik yang bervariasi sehingga dibedakan atas beberapa tingkat yaitu :

1. sistem klasifikasi
2. kerangka konseptual
3. sistem teoritik.

Sementara itu menurut Charles Mac Clelland⁹ berbagai panduan yang digunakan untuk memahami kenyataan - kenyataan di sekeliling kita terutama dalam kerangka hubungan internasional dinamakan teori. Lebih lanjut ia mengungkapkan definisi teori:

1. *Teori merupakan kerangka dasar untuk mengatur fakta – fakta.*
2. *Teori merupakan pedoman untuk melaksanakan kegiatan.*
3. *Teori merupakan pernyataan mengenai keadaan yang diharapkan.*
4. *Teori merupakan pikiran yang spekulatif.*
5. *Teori merupakan abstraksi.*¹⁰

Meskipun selama ini telah terjadi banyak perbedaan penafsiran tentang teori, namun yang terpenting adalah bagaimana kita memahami kejadian - kejadian di sekeliling kita sehingga perdebatan tentang definisi teori menjadi sebuah uraian interim.¹¹

Dari uraian di atas maka kita dapat semakin mengerti tentang fungsi atau kegunaan teori. Sehingga kita bisa merumuskan bahwa dengan melandaskan diri atas teori yang telah ada kita dapat membuat pemecahan sementara yang lebih mendekati kebenaran walau harus diuji terlebih dahulu. Selain berfungsi untuk merumuskan jawaban yang bersifat sementara, teori juga merupakan alat untuk mengarahkan. Teori dapat memberikan pengarah yang menentukan jenis tindakan yang harus dilakukan. Kebiasaan menggunakan teori untuk merumuskan pemecahan sementara atas sebuah masalah akan mampu menghasilkan aturan main yang tepat.

⁸ Mohtar Masoed, *Ilmu Hubungan internasional*, (Jakarta : LP3ES, 1994), hal.187.

⁹ Charles Mac Clelland, *Ilmu Hubungan Internasional Teori dan Sistem*, (Jakarta : Rajawali Press, 1986), hal.9

¹⁰ *Ibid.*, hal.10.

¹¹ *Ibid.*

Setelah melihat arti dan fungsi teori kita dapat menentukan teori yang tepat yang akan kita gunakan. Apabila kita melihat permasalahan yang ada yang telah dirumuskan, maka teori yang relevan yang dapat digunakan adalah teori kekuatan (power). Menurut Holsti¹² kekuasaan dibagi menjadi 3 unsur analisa yaitu :

1. tindakan (proses, hubungan) untuk mempengaruhi negara lain.
2. sumber yang digunakan untuk membuat pengaruh yang dipunyai berhasil.
3. tanggapan terhadap tindakan tersebut.

Sedangkan menurut pendapat Coulombus dan Wolfe¹³, power bisa dilihat dalam 3 unsur yaitu:

1. daya paksa (forces)
2. pengaruh (influence)
3. wewenang (authority)

Apabila kita melihat kedua pendapat di atas terdapat kesinambungan kedua pendapat tersebut. Unsur – unsur kekuatan seperti yang diungkapkan oleh Coulombus dan Wolfe akan dilanjutkan pada sisi operasional oleh pendapat Holsti dimana kekuatan akan berjalan dan berhasil apabila memiliki sumber daya yang cukup.

Selanjutnya terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kekuatan baik sebagai daya paksa maupun pengaruh serta wewenang yaitu :¹⁴

1. relevansi sumber daya dengan sistuasi diplomatik.

¹² K.J Holsti, *Politik Internasional, Sebuah Kerangka Untuk Analisis, Jilid 1*. (Jakarta : P.T Erlangga, 1988) hal 160.

¹³ T.A Coloumbus dan J.H Wolfe, *Introduction to International Realtions* dikutip oleh Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional*, (Jakarta : LP3ES , 1989) hal 118 - 120

¹⁴ Holsti.*op.cit.*, hal.165 - 170.

makin besar relevansi sumber daya kekuatan yang digunakan dengan negara sasaran, maka daya paksa yang dihasilkan akan semakin besar.

2. hubungan ketergantungan dalam hubungan pengaruh.

semakin besar ketergantungan sebuah negara atas negara lain, maka akan semakin lemah kekuatan negara tersebut.

3. tingkat kemampuan teknis.

makin tinggi tingkat penguasaan teknis sebuah negara maka akan makin besar kekuatan negara tersebut.

4. kualitas tanggapan sesaat.

makin diterima tanggapan atau respon suatu negara terhadap sebuah tekanan dari negara lain, maka makin lemah daya paksa negara penekan.

5. kemungkinan yang akan terjadi.

Bila kita melihat teori tersebut dalam konteks Indonesia, kelima variabel yang disebutkan di atas memiliki pengaruh. Namun terdapat tiga variabel yang memiliki pengaruh yang dominan yaitu variabel ketergantungan, variabel tingkat kemampuan teknis dan variabel kualitas tanggapan sesaat. Ketiga variabel tersebut selalu muncul dalam setiap tindakan atau perilaku Indonesia dalam setiap pembuatan kebijakannya atas HAM yang dikaitkan dengan sistem internasional.¹⁵ Misalnya seperti tekanan internasional yang terjadi pada kasus ancaman pencabutan fasilitas GSP (*Generalized System of Preferences*) oleh Amerika terhadap Indonesia pada tahun 1994. Ketergantungan yang besar dari produk Indonesia atas fasilitas tersebut pada akhirnya membuat Indonesia harus menyetujui berbagai tuntutan Amerika dengan mengeluarkan berbagai kebijakan baru guna melakukan perbaikan atas kondisi buruh.

¹⁵ Pembahasan lebih lanjut lihat bab III dan bab IV.

Di samping itu juga variabel kualitas tanggapan sesaat berperan dalam menjelaskan bagaimana tanggapan Indonesia atas kecaman dari dunia internasional dengan membentuk tim penyelidik dalam kasus Santa Cruz tahun 1991 mampu mengembalikan kepercayaan Jepang dan Amerika guna mengucurkan bantuan luar negerinya kepada Indonesia.

Dari paparan di atas, maka terdapat beberapa asumsi yang dapat dipakai dalam teori kekuatan untuk menjelaskan fenomena yang berlangsung dalam hubungan antar negara yaitu:¹⁶

1. tidak ada hak dan keadilan yang absolut dalam hubungan antar negara.
2. nilai kolektif yang ada adalah pelestarian sistem
3. menolong diri sendiri merupakan aturan setiap tindakan.
4. negara memiliki batas kemampuan.
5. prinsip umum tidak berlaku, hanya kekuasaan dan kapabilitas sendiri.
6. faktor kekuatanlah yang menentukan yang benar

Setelah kita melihat berbagai hal tentang teori kekuatan, maka kita akan mencoba mengoperasionalkan hal ini. Menurut Karl Deutch¹⁷, terdapat 3 elemen dalam operasionalisasi teori kekuatan yaitu :

1. Wilayah kekuasaan yang meliputi kekuasaan internal dan eksternal yang dapat dilihat dari luas wilayah , jumlah penduduk dan GNP.
2. Intesitas kekuatan yaitu range antara ganjaran atau sangsi yang paling buruk serta hadiah atau imbalan yang paling baik yang dapat diberikan dalam internal maupun eksternal.
3. Ruang lingkup yaitu pengendalian tingkah laku oleh negara

¹⁶ Dahlan Nasution, *Politik Internasional, Konsep dan Teori* (Jakarta : Erlangga, 1991) hal 43.

¹⁷ Maso'ed, *ibid.* hal 165 - 170

Operasionalisasi dari kekuatan yang diungkapkan oleh Karl Deutch akan menjadi dasar dalam melihat kekuatan Indonesia dalam merespon tekanan internasional

Teori kekuatan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini akan diawali dengan penggambaran kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia yang terbagi dalam 3 bagian yaitu kekuatan politik, kekuatan ekonomi dan kekuatan militer. Masing – masing dari kekuatan ini akan coba dijelaskan dalam variabel – variabel yang lebih terinci.

Setelah kita mengetahui gambaran kekuatan relatif Indonesia, maka langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah mengukur besarnya ketergantungan kekuatan Indonesia tersebut pada dunia internasional. Pengukuran tingkat ketergantungan yang dimiliki oleh suatu negara dalam teori kekuatan cukup penting dalam melihat besarnya pengaruh yang muncul. Semakin besar ketergantungan yang dimiliki oleh Indonesia pada dunia internasional, maka kekuatan Indonesia juga akan semakin lemah yang pada akhirnya dapat dimungkinkan semakin memperkuat pengaruh tekanan internasional.

Di samping pengukuran ketergantungan Indonesia atas dunia internasional, maka kita juga harus melihat relevansi dari sumber daya yang dimiliki Indonesia dengan tekanan yang dilakukan oleh dunia internasional. Apabila sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia berkaitan erat dengan tekanan yang dilakukan oleh dunia internasional maka bukan tidak mungkin pengaruh yang ditimbulkan dari tekanan tersebut akan semakin kuat, sebagai contoh, seperti yang terjadi dalam perang Vietnam. Dalam perang tersebut, tekanan yang dilakukan oleh Amerika kepada Vietnam justru pada bidang – bidang industri dan militer. Sementara bagi Vietnam sendiri yang berbasis pertanian, bidang industri dan militer tidak begitu penting. Hal tersebut memunculkan ketidakterkaitan antara tekanan yang dilakukan Amerika dengan sumber daya yang dimiliki oleh Vietnam. Jadi semakin jelas bahwa relevansi tekanan yang

dilakukan dunia internasional akan semakin memperbesar pengaruh yang ditimbulkan terhadap kebijakan HAM Indonesia.

1.5. Hipotesa

Hipotesa merupakan sebuah jawaban sementara dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam sebuah karya ilmiah. Hipotesa didasarkan atas teori yang relevan yang menjadi satu kerangka pemecahan masalah. Walaupun hipotesa merupakan jawaban, namun hipotesa masih perlu diuji kebenarannya secara empiris.

Menurut Sumadi Suryabrata, *“hipotesa merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkatannya¹⁸”*. Jadi pengertian hipotesa sendiri hanya bersifat prediksi namun dengan tingkatan yang lebih mendekati kebenaran.

Dalam usaha melihat efektivitas pelaksanaan politik luar negeri atas HAM dalam upaya meningkatkan kekuatan nasional maka hipotesa yang dapat diambil dengan melihat fenomena - fenomena yang ada dengan melandaskan diri pada teori yang dipakai adalah *tekanan internasional yang muncul akibat adanya pelanggaran HAM sangat mempengaruhi kebijakan Indonesia atas HAM pada masa pemerintahan Soeharto karena terdapat ketergantungan Indonesia yang besar pada dukungan internasional dalam bidang ekonomi dan militer.*

¹⁸ Suryabrata, *op.cit*, hal 75.

I.6. Metode

Suatu penelitian yang dilakukan tentu memiliki tujuan – tujuan yang ingin dicapai yaitu kebenaran dengan tingkat – tingkat variabel atau gejala yang ada. Untuk mencapai tujuan tersebut harus ditentukan suatu pola keteraturan kerja dalam melakukan penelitian berdasarkan data dan gejala – gejala yang muncul. Keteraturan kerja itulah yang disebut dengan metode. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, metode adalah :

“Cara yang teratur dan terpikir baik – baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya), cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.”¹⁹

Selanjutnya dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yang lebih bersifat sekunder. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu, jarak, dan biaya dari penulis untuk mendapatkan data primer. Sekalipun sifat datanya sekunder, namun penulis juga menggali berbagai sumber data yang digunakan melalui seleksi pustaka. Data – data sekunder tersebut diambil dari buku – buku teks dan jurnal yang berkaitan dengan bahasan karya ilmiah ini. Tempat – tempat yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Perpustakaan FISIP Universitas Jember, di Jember
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember, di Jember
3. Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta
4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta
5. Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta
6. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) di Jakarta.

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka Cetakan ketiga tahun 1990) hal 1053.

Dalam metode penganalisaan data, penulis menggunakan metode berfikir deduktif – induktif. Cara berfikir ini berarti menggabungkan cara berfikir deduktif dimana sesuatu hal ditarik dari fenomena umum ke khusus dengan cara berfikir induktif dimana sesuatu hal ditarik dari fenomena khusus dirumuskan dalam fenomena umum. Tulisan ini juga mencoba menganalisa data dari deskripsi yang dibuat. Di samping itu, level analisa negara akan menjadi kerangka analisa permasalahan.

1.7. Pendekatan

Sebuah karya ilmiah memerlukan sebuah pendekatan. Pendekatan dalam karya tulis ilmiah ini berguna untuk membantu melihat permasalahan yang telah dirumuskan. Di samping itu, pendekatan juga mampu memberikan fokus pada pembahasan yang akan dilakukan.

Dalam memilih sebuah pendekatan yang akan digunakan, maka harus diperhatikan beberapa hal yang membantu menentukan pilihan atas pendekatan yang tepat. Pendekatan yang digunakan pada sebuah karya ilmiah harus sesuai dengan teori yang dipakai dalam menjelaskan permasalahan. Oleh karena itu, dengan melihat teori yang digunakan, maka penulis memakai pendekatan realisme politik. Menurut Morgenthau, teori realisme dibangun dengan keyakinan bahwa²⁰

"dunia yang dibangun dari sudut pandang rasional bersifat tidak sempurna, merupakan hasil dari kebutuhan - kebutuhan dari sifat manusia untuk meningkatkan dunia. Seseorang harus bekerja dengan kekuatan - kekuatan tersebut dan bukan melawannya. Di dunia yang tidak terpisahkan dari adanya kepentingan - kepentingan yang berlawanan serta konflik - konflik kepentingan yang berlawananitu, maka prinsip - prinsip moral pada akhirnya tidak akan pernah dapat direalisasikan secara sepenuhnya, akan tetapi prinsip - prinsip tersebut sedapat mungkin harus disebutkan dengan tetap melakukan perimbangan kepentingan yang sifatnya sementara serta melalui penyelesaian konflik - konflik yang selalu bersifat tidak penuh.

²⁰ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations*, dikutip oleh Totok Sarsito, *Teori Realisme Politik Internasional (Hans J. Morgenthau), Suatu Analisis dan Kritik*, (Surakarta : Sebelas Maret University Press, 1993), hal.13.

Mazhab ibi pada akhirnya menganggap sistem check and balance sebagai suatu prinsip universal bagi semua masyarakat yang bersifat pluralistik. Mazhab ini lebih tertarik pada prosedur - prosedur sejarah dan bukannya kepada prinsip abstrak serta dimaksudkan untuk sejauh mungkin memperkecil kejatuhan dan bukannya menciptakan kekuatan yang mutlak".

Berangkat dari keyakinan tersebut Hans J. Morgenthau²¹ menjelaskan terdapat enam prinsip utama dalam realisme politik yaitu :

1. Realisme politik dikendalikan oleh hukum – hukum obyektif yang berakar pada hakikat manusia.
2. Negarawan berpikir dan bertindak dalam sebuah pengertian kepentingan yang didefinisikan sebagai kekuasaan.
3. Corak kepentingan yang menentukan tindakan politik dalam sebuah periode sejarah tertentu tergantung dari konteks politik dan kebudayaan.
4. Realisme politik menyadari pentingnya moral dalam tindakan politik.
5. Realisme politik menolak mengidentifikasi cita – cita moral bangsa tertentu dengan hukum – hukum moral yang menguasai alam semesta.
6. Kaum realis dalam politik mempertahankan otonomi dunia politik.

Dari enam prinsip realisme politik tersebut, maka nampak jelas bahwa sebuah bangsa untuk dapat bertahan dalam hidupnya hanya mungkin melalui kekuatan.

²¹ Hans J. Morgenthau, S Maimoen (penterjemah), *Politik Antar Bangsa, Buku Pertama*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 1990), hal 4– 23.

BAB II

SIKAP INDONESIA ATAS HAK ASASI MANUSIA



II.1. Konsep Hak Asasi Manusia Menurut Indonesia

Hak asasi manusia yang merupakan sebuah isu global pada pasca perang dingin telah menimbulkan banyak penafsiran. Hal ini dibuktikan dengan munculnya 2 kelompok besar yang saling bertentangan yang mencoba menafsirkan HAM. Di satu pihak muncul kelompok yang melihat HAM merupakan sebuah standar hidup manusia yang bersifat universal. Alasan yang mendasari pendapat kelompok ini adalah bahwa sebuah penindasan yang muncul adalah sama dan tidak memiliki kesulitan dalam universalitas HAM sebagai pesan moral yang signifikan.¹ Bahkan Dalai Lama menegaskan bahwa kita harus tidak begitu saja mempercayai pernyataan – pernyataan suatu pemerintah tentang apakah kultur lokal memenuhi syarat atau tidak dengan HAM internasional.² Sementara itu, di lain sisi terdapat kelompok yang menentang universalisme HAM yang melihat HAM sebagai standar hidup yang tetap berlaku relatif. Alasan yang mendasarinya adalah bahwa klaim apapun oleh negara tentang standar - standar HAM internasional yang ada sekarang harus mengakomodasikan kebutuhan perbedaan kultural yang berkenaan dengan sikap skeptis yang tinggi.³ Di samping itu juga isi dan hakikat norma – norma serta nilai – nilai moral suatu kelompok berasal dari - dan dengan demikian relatif terhadap – budaya dan tuntutan kelangsungan hidup kelompok itu sendiri.⁴

¹ John Kelsay dan Summer B. Twiss, *Agama dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta : Institut Dian / Interfidei, 1997), hal. 67.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hal. 64.

⁴ James W. Nickel, Titis Edy Arini (penerjemah), *Hak Asasi Manusia Refleksi Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (Jakarta : P.T Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 99.

Digital Repository Universitas Jember

Sebenarnya secara umum, perkembangan HAM di dunia memiliki beberapa tahapan yang lebih dikenal sebagai perkembangan tiga generasi HAM. Generasi pertama HAM adalah hak sipil dan politik yang muncul pada abad ke – 17 dan abad ke – 18.⁵ Generasi pertama HAM ini muncul sebagai sebuah hasil perjuangan masyarakat di Eropa untuk lepas dari kekuasaan raja – raja yang absolut. Masyarakat menuntut sebuah pembebasan guna memperjuangkan kehidupan mereka sendiri. Di samping itu muncul pula tuntutan atas hak – hak untuk berpikir, berpendapat atau hak untuk bebas dari penyiksaan. HAM pada generasi pertama ini lebih mengarah pada perjuangan akan hak – hak individu. Dalam generasi pertama ini nampak bahwa nilai – nilai liberalisme muncul dalam setiap hak – hak yang dituntut.

Generasi kedua dari HAM muncul pada abad ke 19 sebagai hasil dari ketidakadilan sosial yang terjadi waktu itu.⁶ Pada abad ke – 19 muncul sebuah revolusi yang mengubah tatanan sosial manusia yaitu revolusi industri yang diawali di Inggris. Digantikannya tenaga manusia menjadi tenaga mesin akibat revolusi industri yang terjadi menyebabkan munculnya pengangguran dimana – mana. Pengangguran yang demikian besar pada akhirnya mengakibatkan masyarakat menuntut hak – haknya atas pekerjaan yang layak serta kesempatan untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka. Pada generasi ini, hak – hak asasi manusia yang dipahami masih tetap menggunakan kerangka pemikiran liberalisme sehingga tidak heran bahwa tuntutan ini berkembang di negara – negara Eropa terutama Eropa Barat.

Generasi terakhir dari HAM lebih dikenal sebagai masa perjuangan atas hak – hak solidaritas.⁷ Generasi ketiga ini muncul akibat berbagai penindasan yang terjadi atas kelompok – kelompok minoritas dan mulai berkembangnya totalitarianisme. Tuntutan ini

⁵ Ignatius Haryanto, et.al, *Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Panduan Bagi Jurnalis* (Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000), hal.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

banyak diserukan oleh kelompok negara – negara dunia ketiga. Hak – hak yang dituntut pada masa ini adalah hak – hak atas pembangunan, hak atas lingkungan dan hak – hak kelompok. Generasi ketiga HAM ini sangat berbeda dari generasi pertama dan generasi kedua. Dalam generasi HAM ketiga, yang diserukan adalah hak – hak komunitas atau hak – hak kelompok. Pada tahapan ini juga menggambarkan bagaimana nilai – nilai komunal itu mulai muncul dan melakukan berbagai tuntutan sekaligus perlawanan atas dominannya nilai – nilai individualisme pada generasi – generasi HAM sebelumnya.

Sementara itu dengan mengacu pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB (Perserikatan Bangsa – Bangsa) sebagai organisasi internasional terbesar di dunia menegaskan makna hak asasi manusia itu sendiri

“ Human Right could generally defined as those right which are inherent in our nature and without which, we cannot live as human being. Human Rights and fundamental freedom allow us to fully develop and use our human qualities, our intelligence, our talents and our spiritual and other needs. They are based on mankind's increasing demand for life in which the inherent dignity and worth of each human being will receive respect and protection.”⁸

Lebih lanjut lagi PBB membagi HAM menjadi 2 kelompok besar yaitu hak – hak politik dan sipil serta hak - hak sosial dan ekonomi. Kedua kelompok ini telah dikuatkan dengan nunculnya kovenan yang telah banyak diratifikasi negara – negara di dunia. Kelompok hak – hak asasi manusia tersebut diterjemahkan ke dalam hak – hak yang lebih terperinci yang lindungi oleh kovenan – kovenan tersebut. Berikut ini adalah hak – hak yang diakui oleh nia internasional dengan mengacu pada kovenan hak sipil dan politik yaitu :

No	Pasal	Uraian
1.	6	Hak atas kehidupan
2.	7	Bebas dari siksaan dan perlakuan tidak manusiawi
3.	8	Bebas dari perbudakan dan kerja paksa
4.	9	Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
5.	10	Hak orang tahanan atas perlakuan manusiawi
6.	11	Bebas dari penahanan atas hutang
7.	12	Bebas berpindah dan memilih tempat tinggal

8.	13	Kebebasan bagi warga negara asing
9.	14	Hak atas pengadilan yang jujur
10	15	Perlindungan dari kesewenang-wenangan hukum kriminal
11	16	Hak atas pengakuan yang sama di depan hukum
12	17	Hak atas kebebasan pribadi (privasi)
13	18	Bebas untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama
14	19	Bebas untuk berpendapat dan berekspresi
15	20	Larangan Propaganda, perang dan diskriminasi
16	21	Hak untuk berkumpul
17	22	Hak untuk berserikat
18	23	Hak untuk menikah dan berkeluarga
19	24	Hak anak
20	25	Hak berpolitik
21	26	Kesamaan di muka hukum
22	27	Hak bagi kaum minoritas

Sumber : A.H Robertson, *Human Rights in The World* dikutip oleh Ignatius Haryanto, et.al, *Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik* (Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000), hal.17.

Hak – hak tersebut di atas dijamin oleh kovenan hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh beberapa negara di dunia. Sementara itu, berikut ini juga hak – hak ekonomi, sosial dan budaya yang telah dijamin oleh kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya yang menjadi acuan dasar bagi perumusan hak tersebut lebih lanjut :

No	Pasal	Uraian
1	3	Hak bagi pria dan wanita untuk menikmati hak ekonomi, sosial dan budaya
2	6	Hak untuk bekerja
3	7	Hak untuk memperoleh kondisi kerja yang aman dan sehat, upah yang adil, bayaran yang sama dan liburan dengan tetap memperoleh gaji
4	8	Hak untuk mendirikan dan bergabung dengan serikat kerja, termasuk hak untuk melakukan pemogokan
5	9	Hak atas jaminan sosial
6	10	Hak untuk memperoleh perlindungan keluarga, termasuk perlindungan khusus bagi ibu dan anak
7	11	Hak atas standar hidup yang layak, termasuk sandang, pangan, dan tempat tinggal, dan perbaikan terus menerus terhadap kondisi hidup
8	2	Hak atas taraf tertinggi yang dapat dicapai dalam hal fisik dan mental
9	13	Hak atas pendidikan, pendidikan dasar sebagai hal yang diwajibkan dan bebas bagi semua, dan pendidikan menengah maupun atas yang secara umum terbuka bagi semua (Ayat 14 mengizinkan implementasi secara progresif terhadap hak ini)
10	15	Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan menikmati keuntungan kemajuan ilmu pengetahuan

Sumber : Sandra Kartika dan Sapto Yunus, *Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Panduan Bagi Jurnalis* (Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000), hal 18 - 19

Cara pandang tentang HAM yang berbeda – beda tersebut memiliki pendukung masing – masing. Kelompok yang beranggapan bahwa HAM merupakan standar hidup yang universal banyak didukung dan dianut oleh negara – negara barat yang relatif telah mencapai kemajuan ekonomi yang tinggi.⁹ Pandangan ini terus dipegang oleh Amerika Serikat semenjak pemerintahan Jimmy Carter serta beberapa negara anggota Masyarakat Eropa.¹⁰ Sementara itu, kelompok yang melihat bahwa HAM merupakan suatu norma yang relatif karena harus melihat konteks budaya suatu daerah didukung oleh negara – negara berhaluan sosialis dan negara – negara dunia III.¹¹

Bagi Indonesia sendiri sebenarnya nilai – nilai hak asasi manusia sebenarnya sudah cukup lama tumbuh dalam tatanan sosial masyarakat. Namun memang harus diakui bahwa nilai – nilai yang terkandung memiliki penekanan pada hak – hak kelompok yang sangat berbeda dengan penekanan dari negara barat atas hak – hak individu. Penekanan atas hak kelompok ini terlihat dalam berbagai ajaran agama yang tumbuh di Indonesia. Dalam konsep Budha, masyarakat memiliki pola seperti keluarga dimana bapak dipandang sebagai pemimpin.¹² Sehingga yang ada bukanlah kebebasan individu, melainkan bagaimana menyelaraskan irama individu dengan kelompok. Sementara dalam konsep Hindu, munculnya kasta dipahami sebagai sebuah kewajiban individu untuk menghormati hak kelompok yang menyebabkan individu harus bertindak sepositif mungkin atas kelompok.¹³ Bila kita lihat lebih dalam lagi, kenyataan yang ada dalam pola – pola kehidupan beberapa suku bangsa yang ada di Indonesia juga memperlihatkan kandungan nilai atas HAM yang lebih ditekankan pada sisi hak kelompok untuk dapat hidup.

⁹ R. Eep Saefulloh Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996), hal. 86.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Hal ini nampak jelas terlihat dalam penyusunan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun saat itu negara – negara dunia III belum mau menampakkannya dengan pihak barat.

¹² Antonio Cassese, *Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah*. (Jakarta : Yayasan Obor, 1994), hal 73.

¹³ *Ibid.*

Perdebatan mengenai hak asasi manusia secara modern sebenarnya telah dimulai semenjak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Dalam melihat HAM, Ir. Soekarno berpendapat :

“ Jika kita betul – betul hendak mendasarkan negara kita kepada pola kekeluargaan, pola gotong royong, dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap – tiap pikiran, tiap – tiap paham liberalisme dari pandangan.”¹⁴

Sementara Moh. Hatta mengungkapkan bahwa walaupun yang dibentuk negara kekeluargaan, tetapi masih perlu ditetapkan beberapa hak dari warga negara agar jangan timbul negara kekuasaan.¹⁵ Dalam perkembangannya pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, penafsiran atas HAM di Indonesia tetap berada dalam koridor pertentangan antara universalisme HAM dan relativisme kultural sama seperti yang terjadi di dalam masyarakat internasional.¹⁶ Juwono Sudarsono mencoba mengungkapkan pandangan Indonesia tentang HAM bahwa :¹⁷

"Human right should not be hijacked by advanced industrialized through the unbalance and disproportionate emphasis on civil and political liberties issue. At the same time we in Indonesia recognized that it is the moral obligation of all developing nations to strive for tangible evidence, how ever difficult and demanding to improve civil and political liberties as an integral part of the overall commitment to advanced economic, social and cultural progress"

Dalam pidato kenegaraannya tanggal 17 Agustus 1990, Presiden Soeharto juga memberikan beberapa penjelasan mengenai HAM di Indonesia. Ia menegaskan bahwa

*"Hak – hak asasi manusia harus berjalan seiring dengan dengan kewajiban dan tanggung jawab asasi. Hak asasi semata – mata tanpa kewajiban – kewajiban akan mendatangkan kekacauan, sebaliknya kewajiban – kewajiban tanpa hak – hak asasi akan menimbulkan kebekuan."*¹⁸

¹⁴ Mirriam Budiardjo, *Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta : P.T Gramedia Pustaka Utama 1996), hal. 169.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 170.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 176.

¹⁷ Juwono Sudarsono, *Human Rights: An Indonesia View*, dalam <http://deplu.go.id/policy/view/humanrights/paper/foreign.htm>

¹⁸ Ignatius Haryanto, *et.al.*, *Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Panduan Bagi Jurnalis* (Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000), hal. 25.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri¹⁹ Indonesia juga mencoba membuat penafsiran atas HAM :

”Umat manusia telah hidup dan sedang hidup dalam masyarakat – masyarakat yang berbeda, yang terorganisasi berdasarkan cara hidup yang berlainan, dipandu oleh sejarah dan pengalaman yang berbeda – beda, politik, ekonomi, sosial dan keamanan khususnya mereka sendiri. Berangkat dari adanya kenyataan ini tentu saja tidak ada pemecahan tunggal bagi masalah implementasi untuk semua negara sepanjang masa... Implikasi hak asasi manusia seharusnya diserahkan kepada yurisdiksi nasional karena tiap bangsa mengerti dan menyadari masalah – masalahnya secara lebih baik.”²⁰

Dalam pandangan departemen luar negeri Indonesia nampak ditekankan bahwa HAM menjadi sebuah permasalahan yang masih berada dalam yurisdiksi negara sehingga akibatnya negara lain tidak berhak untuk mencampuri urusan – urusan yang ada dalam wilayah yurisdiksi negara lain, termasuk HAM.²¹ Pandangan Indonesia yang paling tegas diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas dalam Konferensi Wina tanggal 14 – 25 Juni 1993 : *“without such a balance, the rights of the community as a whole can be denied which can lead to instability and even anarchy.”*²²

Dari beberapa pandangan di atas, semakin jelas sikap Indonesia atas HAM. Indonesia melihat bahwa HAM harus dilihat dalam sebuah konteks relativitas budaya dari sebuah bangsa yang sangat beragam di dunia. Indonesia menentang adanya universalitas

¹⁹ Peran departemen luar negeri di sebuah negara sangat penting dalam membuat sosialisasi pendapat atas HAM di dalam masyarakat internasional. Untuk melihat peran dan fungsi lembaga ini secara lebih jauh lihat :R.G Feltman, *Diplomatic Handbook* (New York : Longman Group [FE] Limited, 1988), hal. 9 – 13.

²⁰ Ganewati Wuryandari, *Hak Asasi Manusia dan Politik Luar Negeri Indonesia*, Analisis CSIS tahun XXVIII/1999 no 2 (Jakarta : Centre for Strategic and International Studies, 1999), hal. 189.

²¹ Sebagai akibat pertentangan yang keras antara pandangan universalisme HAM dan relativisme kultural, maka muncul pula pertentangan antara konsep otonomi negara dan kosmopolitanisme dalam pelaksanaan HAM. Lihat Edy Prasetyanto, *Hak Asasi Manusia dalam Hubungan Internasional*, Analisis CSIS tahun XXII no 1 Januari – Februari , 1993 (Jakarta : Centre for Strategic and International Studies), hal. 77 – 79.

²² Wuryandari, *op.cit.*, hal. 187.

dalam memaknai pelaksanaan HAM. Di samping itu juga, dalam setiap diplomasi HAM, Indonesia menggunakan beberapa azas yaitu :²³

1. Prinsip penghormatan terhadap *sovereign quality and friendship* antar negara.
2. *Non Conditionality*. Indonesia tidak akan menggunakan dan tidak akan mau didesak oleh pihak luar dalam masalah pelaksanaan HAM yang dikaitkan dengan bantuan dari luar untuk Indonesia.
3. *Universality*. Indonesia mengakui sifat universal HAM meskipun dalam pelaksanaan operasionalnya diserahkan kepada tanggung jawab masing - masing negara.
4. Prinsip pemakaian pendekatan *the indivisibility, interdependence dan interrelated of human rights*.
5. Keseimbangan antara *human rights dan human responsibilities*

Dari sikap dan azas yang dipakai tersebut pada akhirnya memposisikan Indonesia berada pada barisan kelompok negara – negara sosialis dan kelompok negara – negara dunia III.

II.2. Diplomasi dan Sosialisasi HAM Indonesia

Pada masa pasca perang dingin, HAM mulai mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam tata hubungan internasional. Hal ini dibuktikan dengan dimasukkannya secara eksplisit isu HAM dalam lima pilar kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Bill Clinton.²⁴ Di samping itu, negara – negara di Eropa Barat, baik sendiri –

²³Final Report, *Diplomasi Indonesia Bidang HAM Dalam Kaitannya Dengan Vienna Declaration and Program of Action*, Juni 1993, (Jakarta : Kerjasama PACIS dan Balitabang Dple, 1998),. hal.29 - 30

²⁴*Ibid.*, hal. 181

sendiri maupun sebagai satu kesatuan dalam Uni Eropa (UE) menggunakan isu HAM ini dalam politik luar negerinya.²⁵

Melihat perkembangan HAM pada pasca perang dingin itu, membuat Indonesia juga memberikan perhatian yang cukup besar dalam merespon perkembangan HAM. Salah satu upaya Indonesia untuk merespon perkembangan HAM adalah keikutsertaan Indonesia selama 2 kali masa keanggotaan yaitu tahun 1991 – 1993 dan 1994 – 1996 dalam Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa – bangsa (PBB).²⁶ Dalam mencoba membuat sosialisasi atas HAM kepada dunia internasional Indonesia yang diwakili Departemen Luar Negeri R.I dan PBB pada tanggal 22 Juni 1991 menjadi tuan rumah Lokakarya Hak Asasi Manusia.²⁷ Indonesia mencoba memberikan pandangannya tentang HAM dalam lokakarya tersebut yang dihadiri oleh beberapa negara. Upaya sosialisasi Indonesia atas HAM terus aktif dilakukan. Setelah lokakarya tahun 1991, kemudian pada bulan September 1992 diadakan pertemuan Gerakan Non Blok di Jakarta yang telah menghasilkan Pesan Jakarta. Dalam Pesan Jakarta menyatakan :

“ Kami menegaskan kembali bahwa hak – hak asasi manusia dan kebebasan – kebebasan asasi memiliki validitas universal. Kami menyambut baik tumbuhnya kecenderungan menuju demokrasi dan kami meyanggupkan diri untuk bekerjasama melindungi hak – hak asasi manusia. Kami percaya bahwa kemajuan ekonomi dan sosial memudahkan dicapainya tujuan – tujuan ini. Akan tetapi jangan ada satupun negara menggunakan kekuatannya untuk mendiktekan konsepnya tentang demokrasi dan hak – hak asasi ataupun memberlakukan persyaratan – persyaratannya kepada negara lain.”²⁸

²⁵ Evi Fitriani, *HAM di Eropa*, Global Journal Politik Internasional September 2000 (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia 200), hal. 22.

²⁶ Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi Hak Asasi Manusia : Kasus Indonesia dengan Timor – Timur*, Analisis CSIS tahun XXIX / 2000 no 2 (Jakarta : Centre for Strategic and International Studies), hal. 183.

²⁷ Sejarah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam <http://www.komnas.go.id/indonesia/archieve/komnas/index.html>, diakses tanggal 12 Agustus 2001.

²⁸ Ignatius, *et.al.*, *op.cit.*, hal. 25.

Bila kita mencermati Pesan Jakarta tersebut, nampak bahwa Indonesia mampu mempengaruhi negara – negara yang tergabung* dalam Gerakan Non Blok atas konsep Indonesia tentang HAM.

Pada tahun yang sama, juga diadakan Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN yang berhasil mengeluarkan Komunique Bersama yang menegaskan tentang hak yang mendasar dan universal namun ditentukan oleh kebudayaan dan sejarah serta kondisi sosial ekonomi yang berbeda di tiap negara dimana penghargaan serta penerapannya di dalam konteks nasional berada dalam wewenang dan tanggung jawab masing – masing negara.²⁹

Pada tanggal 26 – 28 Januari 1993 di Jakarta diadakan *UN Workshop on Human Rights* sebagai upaya untuk membentuk piagam hak asasi di Kawasan Asia Pasifik.³⁰ Pertemuan ini dilanjutkan dengan *UN Regional Meeting for Asia on Human Rights* pada tanggal 29 Maret – 2 April 1993³¹ yang telah menghasilkan pandangan – pandangan non barat secara jelas sekalipun belum bisa menghasilkan sebuah deklarasi. Baru pada bulan September 1994 dihasilkan Deklarasi Kuala Lumpur yang kerangkanya disusun oleh *AIPO (ASEAN Inter Parliamentary Organization)* yang menjelaskan pemikiran bangsa – bangsa yang tergabung dalam ASEAN yaitu bahwa hak – hak asasi manusia adalah *universal, indivisible, inalienable*.³²

Di samping dalam forum – forum di tingkat regional, Indonesia juga menghadiri pertemuan - pertemuan internasional. Pada tanggal 14 – 25 Juni 1993, Indonesia menghadiri Konferensi Wina yang diadakan di Wina, Austria. Konferensi ini diadakan guna memecahkan pertentangan tentang pemahaman hak asasi manusia yang selama ini terjadi. Dalam

²⁹ Wuryandari, *op.cit.*, hal. 187.

³⁰ Budiardjo, *op.cit.*, hal. 162.

³¹ *Ibid.*, hal. 163.

³² *Ibid.*

pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas mengulang kembali berbagai sikap dan pemahaman Indonesia atas HAM :

*“This is a call for a greater recognition of the immense complexity of the issues of human right due to the wide diversity, history, culture, value system, geography and phases of development among nation of the world. And there for this is also a call addressed to all of us to develop a greater sensivity to world this complexity and greater humanity and less righthenousses in addressing human rights issues.”*³³

Lebih lanjut, Alatas menekankan bahwa hak asasi dituangkan dalam konteks kerjasama internasional atas dasar *“respect for sovereign equality of states and the national identity of peoples.”*³⁴

Diplomasi dan sosialisasi HAM Indonesia terus dilakukan dalam forum – forum internasional. Hal ini bertujuan untuk mensosialisasikan pandangan Indonesia tentang hak asasi manusia. Hasil dari diplomasi dan sosialisasi yang dilakukan nampak jelas terlihat dengan munculnya Pesan Jakarta sebagai hasil pertemuan Non Blok. Di samping itu juga, dalam Konferensi Wina, pandangan – pandangan non Barat mulai diakomodasi dengan munculnya hak atas pembangunan.³⁵

II.3. Respon Indonesia Terhadap Tekanan Internasional Atas Pelaksanaan HAM di Indonesia

Penegakkan HAM pada pasca perang dingin di suatu negara saat ini cenderung dikaitkan dengan hal – hal lain seperti bantuan ekonomi dan bantuan militer dalam hubungan antar negara. Uni Eropa mulai menggunakan isu HAM sebagai instrumen politik luar negerinya khususnya yang berkaitan dengan pemberian bantuan kepada negara – negara

³³ *Ibid*, hal. 178.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ *Ibid*.

lain.³⁶ Keseriusan Uni Eropa dalam merespon isu HAM terlihat dengan dihasilkannya Konvensi Lome yang ditandatangani oleh Masyarakat Eropa dan 68 negara *ACP (Africa, Caribia and Pasific)*. Tahun 1989³⁷ kecenderungan dikaitkannya HAM dengan bantuan ekonomi juga terlihat dalam garis kebijakan beberapa lembaga keuangan internasional seperti *World Bank* dan *IMF (International Monetary Fund)*.³⁸ Perlindungan HAM ini pada akhirnya memunculkan kontroversi di seputar tiga konsep utama dalam Piagam PBB yaitu kedaulatan (*sovereignty*), yurisdiksi domestik (*domestic jurisdiction*) dan perdamaian internasional (*international peace*).³⁹

Bagi Indonesia, kontroversi yang terjadi dalam perkembangan HAM menyebabkan Indonesia banyak menerima tekanan akibat penegakkan HAM di Indonesia yang dinilai buruk oleh masyarakat internasional. Hal ini dibuktikan dengan berbagai tekanan yang diterima Indonesia seperti pada tahun 1991 ketika terjadi Tragedi Dilli 12 November 1991. Saat itu banyak pihak bereaksi seperti yang ditunjukkan oleh Cleinbord Pell, seorang anggota senat Amerika Serikat yang berkata :

“Indonesia telah menunjukkan bahwa negara itu berada di luar arena besar dunia yang sedang berubah ke arah penghormatan yang besar terhadap HAM dan untuk menentukan nasib sendiri. Kecenderungan di Tim-tim benar – benar menimbulkan kesangsian mengenai kemampuan Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang beradab, untuk menjadi juru bicara yang mempunyai kredibilitas bagi gerakan Non Blok dalam lingkungan dunia yang sedang berubah.”⁴⁰

³⁶ Fitriani, *op.cit.*, hal.30.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Dalam kegiatannya World Bank mulai memperlihatkan garis kebijakan yang mengacu pada Deklarasi Universal HAM seperti larangan mengaitkan faktor politik. Bank Dunia harus mengacu pada standar hak asasi manusia internasional mengingat Bank Dunia adalah badan khusus PBB yang harus bertindak sesuai dengan Piagam PBB dan negara peminjam harus mampu memperlihatkan kepedulian HAM mereka sebagai “isu ekonomi.” Sementara bagi IMF hal yang mendasari dikaitkannya operasional IMF atas HAM adalah karena IMF sebagai subyek hukum internasional memiliki beberapa tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya masing – masing negara anggotanya dari pelanggaran HAM. Lihat Daniel D. Bradlow, *Bank Dunia, IMF dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999).

³⁹ Rizal Sukma, *Indonesia dan Kecenderungan Intervensi Internasional*. Makalah yang disampaikan dalam Forum Dialog VII Litbang Deplu “Politik dan Keamanan Regional Pasca Perang Dingin di Bandung 7 Juli 2000.

⁴⁰ Djelantik, *op.cit.*, hal. 181.

Tekanan paling berat adalah ketika J.P. Pronk ketua IGGI mengkritik pelaksanaan HAM di Indonesia. Kritik ini berlanjut dengan ditariknya kembali dana bantuan ekonomi dari Belanda yang disusul dengan Australia, Denmark, dan Canada.⁴¹ Namun ternyata tekanan internasional ini dijawab dengan keras oleh Indonesia dengan membubarkan IGGI karena menganggap IGGI terlalu mencampuri urusan domestik Indonesia.⁴² Kemudian sebagai ganti IGGI didirikanlah *Consulative Group on Indonesia (CGI)* pada bulan Juli 1990. Di samping itu Indonesia juga menolak segala bantuan ekonomi yang berasal dari pemerintah Belanda. Dalam upaya menjelaskan peristiwa Dilli 12 November 1991 Presiden Soeharto mengutus Ali Alatas ke dalam forum – forum internasional.⁴³ Sekalipun kebijakan untuk membubarkan IGGI juga didasari oleh komitmen Amerika dan Jepang untuk memberi dana hingga terkumpul 4,9 milyar namun hal ini tetap memunculkan gangguan APBN tahun anggaran 1992 – 1993.⁴⁴

Indonesia mulai mencoba mengembalikan citra dan komitmen atas penegakan HAM setelah tragedi Dilli 12 November 1991. Hal ini ditunjukkan dengan mendirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tanggal 7 Juni 1993. Munculnya Keputusan Presiden nomor 5 tahun 1993 menjadi landasan yuridis berdirinya Komnas HAM.⁴⁵ Berdirinya Komnas HAM merupakan prestasi tersendiri karena dengan begitu Indonesia merupakan negara kedua di Asia Tenggara setelah Filipina dan keenam di Asia Pasifik setelah Selandia Baru, Australia, India, Srilanka yang memiliki lembaga macam ini.⁴⁶

⁴¹ Leo Suryadinata, *Politik Luar Negeri Indonesia Di Bawah Soeharto* (Jakarta : LP3ES, 1997), hal. 237.

⁴² Wuryandari, *op.cit.*, hal. 190.

⁴³ Suryadinata, *loc.cit.*

⁴⁴ *Ibid.*

³⁸ *Sejarah Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, dalam <http://www.komnas.go.id/indonesia/archieve/komnas/index.html>. diakses tanggal 12 Agustus 2001.

⁴⁶ Wuryandari, *op.cit.*, hal. 193.

Pada tahun 1994, Ali Alatas mengeluarkan pernyataan yang cukup keras berkaitan dengan akan diadakannya Konferensi Internasional Asia Pasifik mengenai Timor Timur yang akan berlangsung di Manila pada bulan Mei 1994. Menurut Alatas “ *The ASEAN spirit included not allowing one country to be used as a platform to discredit the other.*”⁴⁷ Protes ini direalisasikan dengan ditariknya 22 rencana kerja sama ekonomi senilai lebih dari US\$ 22 juta yang telah disepakati oleh Indonesia dan Filipina. Di samping itu, Indonesia menunda pertemuan di Davao untuk membahas pembentukan *The East ASEAN Growth Area (EAGA)*, menahan 200 nelayan Filipina yang tertangkap di perairan Indonesia dan menghentikan sementara peran sebagai perunding perdamaian antara Manila dengan pemberontak Muslim Moro di Mindano.⁴⁸

Di samping tekanan – tekanan di tingkat regional Indonesia juga menghadapi tekanan dari beberapa negara barat seperti Amerika dan Uni Eropa. Pada tahun 1993, AS mengancam untuk mencabut *fasilitas The Generalized System of Preferences (GSP)* dengan alasan tidak adanya penghargaan atas hak asasi manusia dalam kehidupan buruh.⁴⁹ Kelompok – kelompok LSM di Eropa juga berusaha menghalangi penjualan 24 pesawat *Hawk* Inggris dan kapal – kapal armada laut bekas Jerman Timur kepada Indonesia. Hal ini terlihat dalam keputusan *European Network Against Arms Trade (ENAAT)* untuk melancarkan kampanye penghentian perdagangan senjata ke Indonesia pada tahun 1994 melalui penerbitan dan lobi.⁵⁰

Tekanan – tekanan tersebut pada akhirnya direspon oleh Indonesia melalui berbagai kebijakan. Melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja tanggal 20 Desember 1993

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 191.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Eep Saefullah, *op.cit.*, hal. 89.

⁵⁰ Wuryandari, *loc.cit.*

pemerintah Indonesia melakukan perbaikan ketentuan upah minimum.⁵¹ Di samping itu juga pada Januari 1994, Indonesia mencabut Ketentuan Menteri Tenaga Kerja nomor 342 tahun 1986 yang melegalisasi keterlibatan militer dalam setiap aksi dan sengketa buruh dan majikan.⁵² Sementara itu dalam hal persenjataan militer, nampaknya Indonesia masih mampu menolak tekanan yang dilancarkan oleh LSM yang berasal dari Eropa. Pembelian 39 kapal laut bekas armada Jerman Timur untuk jenis *Parchim dan Frost*⁵³ dan pembelian persenjataan militer dari Inggris tetap dilakukan. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai impor Indonesia atas produk – produk persenjataan militer dari Inggris yang mencapai 50 % dari total nilai ekspor senjata Inggris ke berbagai negara.⁵⁴

Sementara itu, tekanan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia juga muncul dari aktor internasional non-state. Dalam laporannya yang diterbitkan pada tahun 1997, lembaga HAM internasional, *Amnesty International* mendesak Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan.⁵⁵ Desakan yang dilakukan oleh *Amnesty International* ternyata ditindak lanjuti oleh *IMF* dengan mendesak penandatanganan Konvensi Anti Penyiksaan dan Konvensi HAM yang lainnya sebagai syarat bagi Indonesia untuk mendapatkan dana bagi pemulihan ekonomi Indonesia⁵⁶ disamping syarat lain. Dalam situasi kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia, pada akhirnya pemerintah Indonesia menyanggupi syarat tersebut sehingga Konvensi Anti Penyiksaan diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 28 September 1998.⁵⁷

⁵¹ *Ibid.*, hal. 194.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Untuk alasan Indonesia membeli kapal – kapal perang bekas Jerman Timur, lihat Hasyim Djalal, *Pembelian Kapal Perang Bekas dari Jerman Timur* dalam Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Dasawarsa 1990 (Jakarta : Centre for Strategic and International Studies, 1997), hal. 240 – 252.

⁵⁴ *Suara Karya*, 27 September 1997.

⁵⁵ Pax Benedanto dan M. Mahendra, *Konvensi Anti Penyiksaan, Panduan Bagi Jurnalis* (Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000), hal 27.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 25.

Tekanan – tekanan dari masyarakat Internasional akan terus dilakukan apabila mereka menilai bahwa penegakkan HAM di Indonesia perlu diperbaiki. Indonesia juga berusaha terus memperbaiki citra dan komitmennya atas HAM dalam berbagai forum internasional termasuk dalam tubuh PBB.



BAB III

UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

GAMBARAN KEKUATAN INDONESIA

Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana gambaran kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini cukup penting untuk dilihat karena ukuran kekuatan Indonesia akan mempengaruhi besar kecilnya pengaruh internasional yang diterima oleh Indonesia sehingga dapat mempengaruhi perilakunya.

Ada 3 bagian yang akan menjadi fokus penggambaran kekuatan Indonesia yaitu gambaran kekuatan politik, kekuatan ekonomi dan kekuatan militer. Dalam tata pergaulan internasional, performa dari ketiga kekuatan ini sangat menentukan perilaku sebuah negara.

II.1 Kekuatan Politik

Pada bagian ini, kita akan mencoba melihat kekuatan politik yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini tentu tidak lepas dari sebuah konteks kekuatan dinamis. Artinya kekuatan politik Indonesia akan dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh negara lain.

Konsep tentang kekuatan politik dijelaskan oleh Hans J. Morgenthau. Menurutnya kekuatan politik merupakan sebuah hal yang memiliki tujuan akhir untuk merebut kekuasaan.¹ Sementara itu, lebih lanjut, kekuasaan politik dijelaskan oleh Miriam Budiardjo² sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) dalam berbagai bentuk yang mempunyai akibat sesuai dengan tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri.

¹ Hans. J. Morgenthau, S. Maimoen (pent), *Politik Antar Bangsa., Buku Pertama*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1990), hal 41.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hal. 39.

Kekuasaan untuk mewujudkan tujuan – tujuan tertentu itu diwujudkan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, ataupun pertahanan.

Dalam melihat kekuatan politik Indonesia sendiri, ada dua hal yang perlu dibahas yaitu bagaimana sistem politik dalam negeri berjalan dan pengaruh yang dimiliki oleh Indonesia dalam pergaulan internasional termasuk bagaimana pengaruh aktor politik yang menonjol dalam hubungan internasional yang berasal dari sistem politik Indonesia. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan patokan yang jelas tentang bagaimana kekuatan politik Indonesia diukur.

Berbicara tentang sistem politik dalam negeri Indonesia, hal penting yang harus dibahas adalah bagaimana menganalisa kemampuan sistem politik itu sendiri. Stabilitas sistem politik yang tercipta pada akhirnya akan memberikan sumbangan kekuasaan yang positif bagi negara itu sendiri dalam konteks pergaulannya dengan negara lain. Menurut Gabriel A. Almond dan G.B Powell Jr. terdapat 6 macam kemampuan sistem politik suatu negara yaitu:³

1. *The Extractive Capability*

Yaitu kemampuan sistem politik untuk mengelola sumber – sumber material dan manusiawi dari lingkungan domestik maupun lingkungan internasional.

2. *The Distributive Capability*

Menunjukkan kemampuan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan berbagai jenis barang, jasa, kehormatan, status dan kesempatan yang berasal dari dalam sistem politik itu sendiri kepada individu – individu, dan kelompok yang berasal dari masyarakat.

³ Dikutip oleh Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural – Fungsional*, (Surabaya : Penerbit SIC, 1998), hal. 16-17.

3. *The Symbolic Capability*

Kemampuan mengalirkan simbol dari sistem politik yang ada ke lingkungan masyarakat maupun lingkungan internasional.

4. *The Regulative Capability*

Yaitu kemampuan untuk mengontrol dan mengendalikan perilaku individu – individu atau kelompok yang berada dalam sistem politik tersebut.

5. *The Responsive Capability*

Kemampuan untuk menghasilkan bahan guna mendeskripsikan keadaan atau bahkan meramalkan

6. *Domestic and International Capability.*

Kemampuan sistem politik untuk berinteraksi dengan lingkungannya.

Dari paparan tersebut di atas, kita bisa semakin jelas mengukur kekuatan politik melalui kekuatan sistem politik yang dimiliki oleh Indonesia.

Setelah melihat unsur – unsur kekuatan dalam sistem politik dalam negeri Indonesia, kita akan melihat beberapa hal yang dapat mempengaruhi sistem politik suatu negara yaitu :⁴

1. Elit politik
2. Birokrasi.
3. Sumber – sumber material
4. Tingkat dukungan masyarakat terhadap sistem politik.

Hal tersebut di atas juga merupakan faktor yang mempengaruhi sistem politik Indonesia.

Pada masa pemerintahan Soeharto, sistem politik berjalan relatif stabil. Hal ini dibuktikan dengan berjalannya secara efektif berbagai unsur dari kemampuan sistem politik yang ada. Di samping itu, masing – masing faktor yang mempengaruhi sistem politik

⁴ *Ibid.*, hal.21

Indonesia juga tidak banyak bergejolak ataupun memunculkan konflik yang merugikan bagi sistem politik Indonesia.

Elit politik yang ada di Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto dapat merumuskan sebuah tujuan bersama sehingga tidak memunculkan pertentangan yang keras dalam tubuh sistem politik Indonesia. Elit politik Indonesia dapat merumuskan tujuan bersama akibat hegemoni yang besar dari aktor politik yang berkuasa saat itu yaitu Soeharto. Hampir setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Soeharto mendapatkan dukungan dari elit politik. Sementara itu, birokrasi yang ada dalam sistem politik Indonesia juga tidak banyak memunculkan gejolak yang berarti. Pemerintahan Soeharto mampu mengontrol birokrasi yang ada pada masa itu. Sentralisasi birokrasi sedemikian kuat hingga ke daerah – daerah.

Dukungan masyarakat pada sistem politik yang adapun terlihat sangat besar. Hal ini dibuktikan dari jumlah anggota masyarakat yang berperan aktif dalam setiap pemilihan umum yang dilakukan. Di samping itu juga, protes keras yang dilancarkan oleh individu atau kelompok dalam sistem politik dapat dihambat.

Namun, bila kita mencermati sistem politik yang ada pada masa pemerintahan Soeharto, ternyata tidak memiliki fondasi yang kuat. Berjalannya sistem politik Indonesia lebih didorong oleh pengaruh Soeharto yang kuat dalam menguasai sistem politik yang ada. Soeharto mampu mengatur berbagai unsur yang mempengaruhi sistem politik Indonesia sehingga kekuatan sistem politik Indonesia mampu dimanipulasi. Elit politik sangat tunduk terhadap kekuasaan Soeharto, demikian pula dengan birokrasi serta dukungan masyarakat atas sistem politik yang dibangun.⁵ Rentannya sistem politik Indonesia pada masa Soeharto terlihat dalam kemampuan sistem politik untuk mendistribusikan kesempatan bagi individu

⁵ Dukungan masyarakat bagi sistem politik Indonesia ternyata bersifat semu karena gejolak penentangan yang ada berhasil diredam oleh pemerintahan Soeharto baik melalui pendekatan represif ataupun persuasif guna menciptakan stabilitas politik. Studi mengenai upaya yang dilakukan pemerintahan Soeharto dalam menjaga stabilitas politik tidak akan dibahas dalam tulisan ini.

atau kelompok yang ada dalam sistem politik Indonesia. Berbagai akses yang tersedia sangat terbatas menyebabkan sistem politik yang dibangun banyak bertumpu pada hegemoni atau pengaruh aktor politik yang berkuasa untuk mengaturnya.

Di samping sistem politik, hal lain yang harus dilihat adalah pengaruh yang dimiliki oleh Indonesia dalam pergaulan internasional. Hal ini akan mampu memperlihatkan kekuatan sesungguhnya dari kekuatan politik Indonesia. Makin besar kekuatan politik yang dimiliki oleh Indonesia, maka makin besar pula pengaruh yang ditimbulkan dalam pergaulannya dengan negara lain.

Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia merupakan negara yang memiliki pengaruh cukup kuat di kawasan Asia dan Asia Tenggara khususnya. Kepemimpinan Indonesia dalam organisasi regional di Asia Tenggara (ASEAN) dan Gerakan Non Blok (Non Aligned Movement). Di samping sebagai salah satu pendiri dari kedua organisasi tersebut, Indonesia juga mampu menunjukkan pengaruhnya yang cukup kuat. Seperti yang diungkapkan oleh Anthony Smith⁶, bahwa ada paling tidak terdapat 3 wilayah pengaruh yang dimiliki oleh Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto yaitu :

1. Pengaruh pada dunia barat terutama dalam bidang perdagangan, investasi dan jaringan bantuan.
2. Pengaruh dalam tingkatan negara – negara dunia berkembang terutama yang termasuk dalam Gerakan Non Blok.
3. Pengaruh dalam tingkatan Asia Tenggara dan organisasi regionalnya, ASEAN.

Pengaruh Indonesia yang kuat ini juga dibuktikan dengan berbagai peranan yang dimainkan oleh Indonesia dalam berbagai permasalahan internasional. Pada tahun 1993,

⁶ Anthony Smith, *Indonesia's Role in ASEAN : The End of Leadership*, dalam *Contemporary South East Asia*, Volume 21 no. 2 Agustus.

Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang mampu menjembatani permasalahan di Timur Tengah antara Palestina dan Israel. Dukungan Indonesia atas pembicaraan rahasia antara Arafat dan Perdana Menteri Yithzak Rabin guna membahas rencana perdamaian ternyata sangat berpengaruh.⁷ Hal ini terlihat dengan disusulnya kunjungan Arafat ke Indonesia.⁸ Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia juga pernah menjabat sebagai Ketua Gerakan Non Blok menyusul diselenggarakannya KTT Non Blok di Jakarta pada tahun 1992. Di samping pengaruh politik yang kuat yang dimiliki oleh Indonesia, Soeharto juga menjadi aktor internasional yang sangat dihormati dan disegani dalam pergaulan internasional.

Kekuatan politik di Indonesia seperti ditegaskan memiliki stabilitas yang cukup baik. Rendahnya kerusuhan – kerusuhan sosial⁹ yang terjadi, serta gangguan keamanan yang relatif rendah menunjukkan hal tersebut. Di samping itu juga, demonstrasi – demonstrasi yang mengganggu stabilitas politik juga tidak muncul ke permukaan. Karena itulah maka sebenarnya Indonesia memiliki kekuatan politik yang cukup kuat karena kemandirian Indonesia dalam menentukan pilihan – pilhan politik yang ada.

⁷ Leo Suryadinata, *Islam and Soeharto's Foreign Policy*, dalam *Asian Survey* Volume XXXV. No 3. Maret (California : University of California, 1995), hal. 294.

⁸ *Ibid.*

⁹ Dalam menjaga stabilitas politiknya, pemerintahan Soeharto menggunakan aparat militer untuk melakukan tekanan bagi kelompok – kelompok oposan yang ada. Hasilnya memang kerusuhan sosial tidak pernah terjadi. Di samping menggunakan alat militer, guna mendapatkan legitimasi politik, pemerintahan Soeharto juga mendapat dukungan dari Golongan Karya yang selalu menjadi partai mayoritas yang mendapatkan suara dia atas 60 % sehingga membuat stabilitas terjaga. Untuk melihat lebih jelas upaya pemerintahan Soeharto menjaga stabilitas politik lihat R. Eep Saefulloh Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996) serta FX. Suwanto, *Maraknya Pelanggaran HAM Berat di Indonesia*, dalam Analisis CSIS tahun XXIX/2000 no. 2 (Jakarta : Centre for Strategic and International Studies, 200), hal. 91-102. Sementara untuk tinjauan teoritik mengenai tindakan kekerasan dalam kaitannya dengan kekuasaan negara baca I. Marsana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1992).

II.2 Kekuatan Ekonomi

Kekuatan ekonomi merupakan sebuah kekuatan yang cukup signifikan untuk diperhitungkan dalam tata hubungan internasional. Seperti yang telah diungkapkan **Holsti**, bahwa sumber daya ekonomi merupakan salah satu kemampuan besar yang dapat dimobilisasikan untuk tujuan – tujuan politik.¹⁰ Pada pola hubungan yang terbangun pasca perang dingin dimana organisasi – organisasi yang bersifat *Multi National Corporation* (MNC) yang bergerak dalam bidang ekonomi, serta kerja sama antar negara yang makin menekankan dalam bidang ekonomi seperti Uni Eropa makin memperlihatkan bahwa kekuatan ekonomi menjadi salah satu faktor yang cukup penting.

Dalam konteks Indonesia sendiri, dalam melihat seberapa besar tekanan internasional dapat berpengaruh atas Indonesia, kita perlu melihat kekuatan relatif ekonomi Indonesia. Menurut William D. Coplins¹¹, penafsiran kapasitas ekonomi suatu negara harus mencakup analisis tentang kemakmuran negara tersebut, sejauh mana kekayaan itu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan pada pola – pola pertumbuhan ekonominya. Sementara itu, menurut Alexander Irwan¹² terdapat 2 indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia yaitu jumlah penduduk Indonesia yang ada di bawah garis kemiskinan dan angka infasi yang dipertahankan di bawah 2 digit.

Bila kita melihat pendapat William D. Coplin, dan Alexander Irwan maka kita mendapatkan sebuah kesamaan diantara keduanya. Indikator – indikator yang digunakan dalam menganalisa kekuatan ekonomi menunjukkan sebuah kesamaan. Indikator – indikator yang dipakai adalah *Gross National Product* (GNP) perkapita yang menyatakan nilai seluruh

¹⁰ K.J Holsti, M Tahir Azhary (Penterjemah), *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis*. (Jakarta : Penerbit Erlangga : 1988) hal. 234.

¹¹ William D. Coplins, Mercedes Marbun (Penterjemah), *Pengantar Politik Inernasional, Suatu Telaah Teoritis*, (Jakarta : C.V. Sinar Baru, 1992), hal. 115.

¹² Alxahder Irwan, *Jejak – Jejak Krisis Asia*, (Jakarta : Penerbit Kanisius, 1999), hal. 201.

barang dan jasa yang diproduksi oleh negara dalam satu tahun¹³, tingkat pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dan ketergantungan ekonomi Indonesia pada dunia internasional. Ketiga indikator tersebut cukup penting untuk dapat dipakai menganalisa kekuatan ekonomi relatif Indonesia.

II.2.1 *Gross Domestic Product (GNP) per kapita.*

Pada masa pemerintahan Soeharto indikator – indikator keberhasilan pembangunan ekonomi menunjukkan prestasi yang mengesankan dan membuat legitimasi bagi pemerintahan Soeharto di mata masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri.¹⁴ Legitimasi ini makin menguat seiring dengan munculnya pendapat masyarakat internasional bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang diramalkan akan memiliki kekuatan ekonomi yang besar sejalan dengan keajaiban ekonomi yang terjadi. Indonesia yang pada tahun 1981 GNP perkapitanya hanyalah sebesar US\$ 561,3 namun pada tahun 1996 telah mencapai US\$ 1.089 (lihat tabel 1). Salah satu indikator pembangunan ekonomi, indikator GNP per kapita menjadi sebuah indikator keberhasilan ekonomi yang diakui oleh banyak pihak.

Menurut Emil Salim, terdapat empat kelompok kebijakan yang mendukung Indonesia untuk mencapai keberhasilan ekonomi yang demikian mengagumkan :¹⁵

1. Kelompok kebijakan ekonomi makro yang mencakup kebijakan anggaran berimbang yang mempertautkan bantuan luar negeri dalam anggaran dan alokasi struktural kebijakan moneter dan perbruhan yang bersifat hati – hati dan kebijakan perdagangan luar negeri dan neraca perdagangan.

¹³ GNP merupakan Produk Domestik Brutto dikurangi pendapatan Netto terhadap luar negeri. Untuk lebih jelas lihat. Ace Partadiredja, *Pengantar Ekonomi* (Yogyakarta :Badan Pemantauan Fakultas Ekonomi UGM. 1981)

¹⁴ Irwan, op.cit, hal. 198.

¹⁵ Emil Salim, *Visi Baru Ekonomi Indonesia* ,dalam Mencari Paradigma Baru Pembangunan Indonesia, Mari Pangestu (ed), (Jakarta : Centre for Startegic and International Studies, 1997), hal. 7.

2. Kelompok kebijakan pertumbuhan struktur ekonomi dari pola ekonomi penghasil bahan mentah menjadi ekonomi industri penghasil barang jadi.
3. Kebijakan kependudukan yang tertuju pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
4. Kebijakan stabilitas politik untuk menjamin iklim politik yang kondusif.

Di samping keempat kelompok kebijakan tersebut di atas, sebenarnya kebijakan untuk terus memperahankan eksistensi Indonesia dalam komunitas masyarakat internasional juga sangat penting untuk diperhitungkan. Hal ini disebabkan karena perdagangan luar negeri Indonesia juga sangat ditentukan oleh sikap masyarakat internasional atas Indonesia.

Bila kita mencermati tabel 1. kita dapat melihat bagaimana indikator GNP per kapita Indonesia membuat Indonesia juga sangat diperhitungkan dalam perdagangan dunia. Dari tahun ke tahun GNP per kapita Indonesia terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Tabel 1.
GNP per kapita Indonesia Tahun 1990 – 1998

Tahun	Gross National Product (GNP) per kapita (US\$)
1	2
1990	561,3
1991	595,0
1992	649,7
1993	842,0
1994	886,0
1995	978,0
1996	1.155,0
1997	1.089,0
1998	610,0

Sumber : Alexander Irwan, *Jejak – Jejak Krisis di Asia* (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1999)

Namun bila kita mengamati lebih lanjut, Indonesia ternyata mengalami penurunan GNP per kapita pada tahun 1998. GNP per kapita Indonesia yang pada tahun 1987 mencapai

1.089,0 dollar US menurun menjadi 610,0 dollar US pada tahun 1998. Hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun tersebut.

Dalam melihat indikator GNP perkapita, kita perlu melihat ini dalam sebuah konteks relatif kekuatan. Artinya kita harus melihat GNP per kapita yang dimiliki Indonesia dalam klasifikasi negara yang ada dan dengan GNP per kapita yang dimiliki oleh negara lain. Bank Dunia telah melakukan sebuah klasifikasi atas negara – negara di dunia berdasarkan GNP per kapita. Dalam laporan tahunannya (*World Development Report*) tahun 1995, Bank Dunia mengklasifikasikan negara berdasarkan besarnya GNP per kapitannya :¹⁶

1. Negara berpenghasilan rendah (*low income economies*) adalah kelompok negara – negara dengan GNP per kapita kurang atau sama dengan 695 dollar AS pada tahun 1993.
2. Negara berpenghasilan menengah (*middle income economies*) adalah kelompok negara – negara dengan GNP per kapita lebih dari 695 dollar AS namun kurang dari 8.626 dollar AS pada tahun 1993.
3. Negara berpenghasilan tinggi (*high income economies*) adalah kelompok negara – negara yang memiliki GN per kapita 8.626 dollar AS atau lebih pada tahun 1993.

Bila kita mencermati klasifikasi yang dilakukan oleh Bank Dunia atas GNP per kapita yang dimiliki oleh negara – negara di dunia, maka kita akan mampu melihat posisi dan kekuatan Indonesia. Pada tahun 1991, Indonesia memiliki GNP per kapita 561,3 dollar AS, namun pada tahun 1993, Indonesia telah memiliki GNP per kapita 842,0 dollar AS yang berarti termasuk negara dengan penghasilan menengah. Hingga tahun 1997, GNP perkapita yang dimiliki Indonesia terus meningkat hingga mencapai 1.089 dollar AS yang berarti makin

¹⁶ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan, Teori dan Masalah Kebijakan* (Yogyakarta : Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1997), hal. 19.

meningkatkan kekuatan ekonomi Indonesia dan termasuk negara berpenghasilan menengah (*middle income economies*). Namun ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, akibat yang dialami terlihat jelas dengan menurunnya GNP per kapita yang dimiliki oleh Indonesia hingga mencapai 610 dollar AS. Hal ini menyebabkan berkurangnya kekuatan ekonomi Indonesia dan jatuhnya kembali posisi Indonesia ke dalam negara berpenghasilan rendah.

II.2.2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi.

Di samping indikator GNP per kapita, maka indikator yang lain yang akan kita lihat di sini adalah indikator tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal ini perlu kita lihat karena tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingkat keberhasilan ekonomi yang dilakukan oleh sebuah negara, termasuk dalam hal ini adalah Indonesia. Indikator tingkat pertumbuhan ekonomi juga akan memperlihatkan sebuah tingkat keberhasilan pembangunan yang dicapai oleh sebuah negara dalam kurun waktu tertentu dimana negara – negara di dunia akan terus mempertahankan tingkat pertumbuhan dan mengejar ketertinggalan ekonominya dari negara lain.

Apabila kita melihat hal yang terjadi di Indonesia mulai tahun 1991 sampai tahun 1996, pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Indonesia selalu berada di atas 5 % (lihat tabel 2). Bahkan pada tahun 1995, Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi hingga sebesar 8,5 %. Dalam tabel tersebut kita bisa melihat tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ke tahun.

Tabel 2.
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1990 – 1998

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2
1990	7,2
1991	6,9
1992	6,3
1993	7,3
1994	7,5
1995	8,2
1996	8,0
1997	4,7
1998	0,0

Sumber : Alexander Irwan, *Jejak –Jejak Krisis Di Asia*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1999)

Berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang demikian inilah Indonesia diramalkan oleh banyak kalangan akan menjadi sebuah negara baru dengan kekuatan ekonomi yang harus diperhitungkan.

Ketika kita melihat tingkat pertumbuhan Indonesia yang dinilai mengagumkan, maka kita sebenarnya perlu melihat hal ini dalam konteks yang lebih luas lagi dalam tata hubungan internasional. Kekuatan ekonomi Indonesia yang dilihat dalam indikator tingkat pertumbuhan ekonomi perlu kita bandingkan dengan negara lainnya di dunia. Apabila kita melihat negara – negara maju seperti Amerika Serikat, Kuwait, maupun Swedia, kita akan mendapati bahwa sebenarnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang mereka capai selalu tidak mencapai angka di atas 5 % per tahunnya. Tabel 3 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selalu mencapai di atas 5% sehingga dilihat sebagai sebuah keajaiban.

Tabel 3.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara

Negara	Pertumbuhan Ekonomi (%) tahun	
	70 - 80	80 - 92
I. Negara Industri		
1. Jepang	4,3	4,1
2. AS	2,8	2,7
3. Jerman	2,6	2,6
4. Prancis	3,2	2,2
5. Kanada	4,6	2,8
6. Italia	3,8	2,4
7. Inggris	2,0	2,1
II. ASEAN		
1. Singapura	8,3	
2. Malaysia	7,3	6,7
3. Thailand	7,1	5,9
4. Filipina	6,0	8,2
5. Indonesia	7,2	5,7
III. Asia Timur		
1. Hongkong	9,2	
2. Korea Selatan	9,6	6,7
IV. Pasific lainnya		9,4
1. Australia	3,0	
2. Selandia Baru	1,9	3,1
		1,4

Sumber : World Bank report, May 1994, Hg. Suseno Triyanto Widodo, *Ekonomi Indonesia, Fakta dan Tantangan dalam Era Liberalisasi* (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1997). hal. 156.

Hal ini tentu saja merupakan sebuah kekuatan tersendiri bagi Indonesia bila melihat kita tingkat pertumbuhannya yang dibandingkan dengan negara lain. Namun hal lain yang dilupakan oleh sebagian pihak dalam menilai keberhasilan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah tentang inflasi yang terjadi di Indonesia. Inflasi menunjukkan sebuah indikator bagaimana nilai barang semakin bertambah yang berarti sangat berpengaruh dalam menilai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam tabel 4 kita bisa melihat bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia ternyata juga mendorong terjadinya hal yang sama dalam tingkat inflasi.

Tabel 4.
Tingkat Inflasi di Negara – Negara ASEAN

Negara	1990	1991	1992	1993	1994
Malaysia	3,1	4,4	4,6	3,7	4,0
Filipina	12,7	18,7	8,9	7,6	10,0
Singapura	3,4	3,4	2,3	2,4	4,0
Thailand	6,0	5,7	4,1	3,4	4,3
Brunei	2,1	1,6	1,3	2,5	2,5
Indonesia	9,5	9,5	4,9	9,77	9,24

Sumber : BPS, dikutip oleh Hg. Suseno Triyanto Widodo, *Ekonomi Indonesia, Fakta dan Tantangan Dalam Era Liberalisasi* (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1997), hal.52.

Bahkan bagi negara – negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat inflasi yang tergolong tinggi. Hal ini tentu saja sangat mengurangi kekuatan ekonomi Indonesia, karena apabila tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia juga diimbangi dengan tingkat inflasi yang tinggi, maka pertumbuhan ekonomi tersebut tidak akan berarti.

II.2.3 Ketergantungan Ekonomi Indonesia pada Dunia.

Saat ini semenjak munculnya blok – blok perekonomian dunia seperti yang terjadi di Eropa, membuat perekonomian dunia terpacu menjadi lebih terintegrasi. Apa yang terjadi di Eropa memacu negara – negara lain di dunia mengubah blok – blok politiknya menjadi lebih berorientasi ekonomi, seperti yang dialami oleh negara – negara yang tergabung dalam ASEAN ataupun Gerakan Non Blok. Fenomena ini nampaknya akan terus menguat dari hari

ke hari. Seperti yang diungkapkan oleh Syahrir¹⁷, tentang munculnya sebuah kecenderungan baru atas ekonomi dunia yang terjadi pada pasca perang dingin yaitu :

1. Arus kapital dunia tidak mengenal home base yang tetap dan gerak keluar masuknya tidak mengenal batas – batas negara.
2. Perdagangan dunia akan menjadi lebih bebas.
3. Arus tenaga kerja dunia akan mengalami lonjakan mobilitas yang tinggi.
4. Konsep *non-tradeable goods* akan mengalami kehilangan makna bila kepemilikan berpindah – pindah secara efektif dan cepat.

Sementara itu, Mari Pangestu mengungkapkan bahwa beberapa kecenderungan global yang mendasar telah berlangsung dalam dekade terakhir ini yang pada dasarnya menyebabkan akselerasi globalisasi dalam perekonomian.¹⁸ Ia melihat bahwa berbagai hal yang terjadi atas perekonomian dunia mendorong laju globalisasi dimana hal ini membuat interaksi antar negara semakin intensif dan memunculkan sebuah integrasi ekonomi. Menurut Faisal H. Basri,¹⁹ dalam menghadapi globalisasi dan tuntutan dunia internasional untuk meliberalisasikan perekonomian, negara berkembang menghadapi banyak permasalahan yaitu tuntutan ekonomi yang menyebabkan sebuah eksploitasi baru yaitu *financial driven economies* terhadap *good producing economy* serta biaya sosial dan politik yang terjadi akibat tuntutan pasar barang dan pasar financial.

Bila kita melihat hal tersebut di atas, maka dalam melihat kekuatan ekonomi suatu negara, termasuk melihat kekuatan ekonomi Indonesia, kita juga harus melihat tingkat keterkaitan ekonomi Indonesia dengan dunia. Keterkaitan di sini adalah apa yang

¹⁷ Syahrir, *Meramal Ekonomi di tengah Ketidakpastian* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal 308 – 309.

¹⁸ Mari Pangestu, *Tantangan Global dan Paradigma Pembangunan*, dalam Mencari Paradigma Baru Pembangunan Indonesia, Mari Pangestu dan Ira Setaiti (ed) (Jakarta : Centre for Strategic and international Studies, 1997), hal 15-21.

¹⁹ Faisal H. Basri, *Krisis Ekonomi di Tengah Gelombang Globalisasi : Implikasinya Bagi Kerjasama Ekonomi di Asia Pasific*, dalam Analisis CSIS tahun XXVIII/ 1999 no 1 (Jakarta : CSIS, 1999), hal 26-30.

dimaksudkan dengan sebuah kecenderungan baru yang muncul dan mendorong laju globalisasi. Sebuah negara yang memiliki ketergantungan ekonomi dengan lingkungan eksternal, negara tersebut memiliki kekuatan ekonomi relatif yang rendah. Hal ini disebabkan karena ketergantungan atas faktor eksternal yang besar menyebabkan negara tersebut rentan terhadap berbagai hal yang terjadi dalam lingkungan eksternal.

Dalam melihat keterkaitan keadaan fundamental ekonomi Indonesia, kita harus melihat dari beberapa hal, salah satunya adalah tentang pembiayaan pembangunan di Indonesia. Sejak tahun 1991 hingga tahun 1998, peran bantuan luar negeri terbilang cukup signifikan dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa anggaran tentang bantuan luar negeri termasuk dalam penerimaan negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan. Dalam tabel 5, kita bisa melihat lebih jelas tentang bagaimana peran bantuan luar negeri sangat signifikan dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia. Dalam tabel tersebut, nilai rata – rata penerimaan luar negeri yang terdiri dari pinjaman proyek dan pinjaman program semenjak tahun 1990/1991 hingga tahun anggaran 1998/1999 selalu lebih di atas 40%. Hal ini sebenarnya secara jelas menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia sangat terpengaruh oleh kondisi eksternal karena ketergantungannya yang demikian besar atas bantuan luar negeri. Indonesia belum mampu membiayai pembangunannya sendiri.

Rentannya perekonomian Indonesia karena ketergantungannya yang demikian besar atas bantuan luar negeri diperparah oleh kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Soeharto dimana pinjaman luar negeri Indonesia di tempatkan dalam penerimaan luar negeri yang menyebabkan Indonesia makin tergantung dengan bantuan luar negeri. Asumsi yang dipakai dalam memasukkan pinjaman luar negeri ini ternyata makin memperparah ketergantungan Indonesia atas bantuan luar negeri.

Tabel 5.
Data Pembiayaan Pengeluaran Pembangunan 1990 /1991 – 1998/1999
(dalam miliar rupiah)

Tahun Anggaran	Pengeluaran Pembangunan	Sumber – Sumber Pembiayaan			
		Tabungan Pemerintah	%	Penerimaan Luar Negeri	%
1990/1991	18.250,8	13.071,9	46,3	8.388,5	39,1
1991/1992	23.074,5	13.529,0	60,9	9.975,1	12,4
1192/1993	26.906,3	15.257,2	57,6	11.097,9	42,1
1993/1994	28.428,1	15.823,2	57,9	10.752,5	40,5
1994/1995	30.691,7	22.349,0	59,5	9.837,8	30,6
1995/1996	28.780,7	22.578,9	69,4	9.008,8	28,5
1996/1997	35.951,7	25.069,2	71,5	11.048,1	30,6
1997/1998	40.938,0	23.577,6	49,4	23.817,0	50,3
1998/1999	92.683,0	-21.902,6	-23,6	114.585,6	123,6

Sumber: Daftar Tabel, Departem Keuangan, dalam <http://www.depkeu.go.Indonesia/indonesia/tabel.html> diakses tanggal 12 Agustus 2001

Sebenarnya bantuan dan pinjaman luar negeri sendiri terdiri dari berbagai bentuk. Ada tiga bentuk bantuan luar negeri yaitu :²⁰

1. dari pemerintah Luar negeri kepada pemerintah Indonesia.
2. dari Lembaga – lembaga Internasional atau Swasta kepada pemerintah Indonesia.
3. Dari lembaga – lembaga keuangan yang yang menyelenggarakan pinjaman komersial.

Di samping ketergantungan pada luar yang ditunjukkan dengan dominannya bantuan luar dalam pembiayaan pembangunan, ketergantungan ekonomi Indonesia juga dapat ditunjukkan dengan jumlah hutang luar negeri yang ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Hutang luar negeri Indonesia diperparah dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1998. Dalam tabel 6 kita bisa melihat bagaimana posisi hutang luar negeri Indonesia.

²⁰ Badjuri, *Perekonomian Indonesia*, (Jember : Kurnia Offset, 1999), hal. 81.

Tabel.6
Jumlah hutang Luar Negeri Indonesia

Tahun	Jumlah dalam milyar rupiah
1994	18.298,4
1995	22.120,8
1996	19,236,7
1997	37,800,0

*Sumber : Kompas, 12 April 1998

Dari tahun ke tahun, hutang luar negeri Indonesia terus membengkak dan semakin parah. Hingga tahun 1998, tercatat total hutang luar negeri pemerintah Indonesia per 23 Februari 1998 adalah 67.773 juta dollar AS.²¹ Dari total jumlah hutang tersebut, hutang pemerintah terdiri dari hutang pemerintah sebesar 54,110 dolar AS dan hutang Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) sebesar 13, 633 dolar AS.²² Hal ini memperlihatkan sebuah lonjakan hutang luar negeri yang cukup tinggi ketika krisis ekonomi menimpa Indonesia. Tentu saja fenomena ini makin menunjukkan sebuah ketergantungan yang besar perekonomian Indonesia atas bantuan luar negeri.

Selain bermasalah dengan hutang luar negerinya, Indonesia juga memperlihatkan sebuah ketergantungan perekonomiannya dalam investasi. Investasi merupakan salah satu motor pendorong pertumbuhan ekonomi dari permintaan agregat maupun dalam sisi penawaran agregat.²³ Penanaman Modal Asing (PMA) memang sangat diperlukan oleh sebuah negara guna merangsang gerak perekonomiannya. Dari antara negara – negara ASEAN, Indonesia merupakan negara yang terbesar kedua dalam menerima investasi bruto yaitu mencapai 59 miliar dollar AS.²⁴ Namun kontribusi Indonesia terhadap faktor investasi

²¹ *Bisnis Indonesia*, 3 April 1998

²² *Ibid.*

²³ Tambunan, *Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI*. (Jakarta : Penebar Swadaya, 1998), hal. 7.

²⁴ *Ibid*

hanya 25%. Ini memperlihatkan ketergantungan Indonesia yang besar atas PMA sebagai motor investasi di Indonesia.

Hal lain yang menunjukkan lemahnya perekonomian Indonesia adalah dalam perbandingan nilai perdagangan luar negeri Indonesia. Perdagangan luar negeri Indonesia selalu mengalami defisit²⁵, atau dengan kata lain impor Indonesia selalu lebih besar nilainya dibanding ekspor yang dilakukan Indonesia. Sampai tahun 1996 kita bisa melihat defisit neraca perdagangan luar negeri Indonesia atas beberapa negara tujuan ekspor Indonesia dalam tabel 8.

Tabel 8
Defisit Neraca Perdagangan Indonesia di Beberapa negara Tujuan

Negara	Ekspor	Impor	Neraca Perdagangan
Jepang	6.761.646	7.715.144	1.353.498
Thailand	596.706	1.045.510	448.804
Korsel	1.359.447	2.183.256	823.711
Australia	494.997	2.086.455	1.591.457
Cina	902.254	1.263.393	361.134
Taiwan	976.254	1.524.883	548.213
Jerman	1.371.408	2.695.642	1.324.234
Italia	556.818	1.097.887	541.068
Prancis	511.070	887.632	376.563
Swedia	99.237	592.602	493.365
Finlandia	65.807	299.407	233.600
Austria	33.304	275.360	242.050
CIS	126.944	201.625	158.681
India	429.366	901.544	372.184

*Sumber : Tambunan, Soelarso, et.al (ed) *Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI* (Jakarta : Penebar Swadaya, 1998)

Kenyataan tersebut memperlihatkan kepada kita bahwa rasio perdagangan luar negeri Indonesia yang defisit dimana nilai impor Indonesia masih lebih besar dibandingkan nilai ekspor memperlihatkan adanya ketergantungan Indonesia yang besar atas impor dari luar negeri.

²⁵Defisit ini merupakan total dari perdagangan baik barang maupun jasa.

Setelah kita melihat berbagai pembahasan mengenai kekuatan ekonomi Indonesia, kita dapat melihat bahwa perekonomian Indonesia masih sangat besar tergantung pada faktor – faktor eksternal. Bantuan – bantuan luar negeri yang diberikan guna menutup anggaran pembangunan, hutang luar negeri yang terus membengkak serta rasio perdagangan luar negeri yang selalu defisit memperlihatkan kepada kita bagaimana kondisi perekonomian Indonesia. Di samping itu juga besarnya ketergantungan Indonesia atas PMA (*Foreign Direct Investment*) sebagai motor utama investasi di Indonesia makin melemahkan kekuatan ekonomi Indonesia.

III.3 Kekuatan Militer

Untuk melihat kekuatan militer sebuah negara, di samping kekuatan ekonomi kekuatan militer tetap memegang arti yang sangat penting dalam mendukung kekuatan nasional sebuah negara. Sekalipun dalam tata hubungan internasional isu –isu tentang kesejahteraan dan ekonomi mengemuka, sedangkan tindakan – tindakan kekerasan baik melalui perang maupun invasi mulai ditinggalkan, namun militer tetap dilihat sebagai sebuah alternatif guna mempengaruhi negara lain. Dalam konteks ini perang yang melibatkan kekuatan militer merupakan sebuah upaya untuk mempertahankan diri yang memiliki legitimasi. Piagam PBB sendiri juga menjabarkan mengenai hak untuk mempertahankan diri, baik itu secara individu maupun kolektif (pasal 51).²⁶ Di samping itu juga, banyak anggapan yang menerangkan bahwa perang yang melibatkan kekuatan militer merupakan sebuah upaya diplomasi terakhir sebuah negara. Hal – hal tersebut di atas makin menguatkan pentingnya kekuatan militer dalam sebuah negara.

²⁶ A. Hasnan Habib, *Sebab sebab Perang*, dalam Kapita Selekta : Strategi dan Hubungan Internasional, (Jakarta : Center for Strategic and International Studies, 1997)., hal. 212.

Untuk melihat kekuatan militer, kita perlu melihatnya dalam beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan militer itu sendiri karena tentu saja militer tidak dapat berdiri sendiri tanpa faktor pendukungnya. Menurut Morgenthau²⁷, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan militer yaitu inovasi teknologi, kepemimpinan, dan kuantitas maupun kualitas angkatan bersenjata. Namun dalam tulisan ini selanjutnya akan dilihat beberapa hal saja dalam mencermati kekuatan militer yang dimiliki oleh Indonesia yaitu kuantitas dan kualitas tentara, penguasaan teknologi militer, dan ketergantungan militer Indonesia pada bantuan asing. Faktor kepemimpinan seperti yang disebutkan oleh Morgenthau akan dilihat dalam kualitas tentara Indonesia termasuk dalam kepemimpinannya.

III.3.1 Kuantitas dan Kualitas Tentara

Jumlah tentara merupakan salah satu indikator dalam mengukur kekuatan militer sebuah negara. Makin besar jumlah tentara yang dimiliki sebuah negara, makin bertambah besar pula kekuatan militer negara tersebut. Negara yang memiliki pasukan yang besar akan disegani oleh negara lain. Ada beberapa hal yang menyebabkan jumlah tentara di sebuah negara sangat penting untuk diperhitungkan yaitu :

1. Tentara merupakan kekuatan inti yang menggerakkan berbagai peralatan militer yang dimiliki oleh sebuah negara. Secanggih apapun peralatan militer sebuah negara, posisi tentara tetap diperlukan.
2. Tentaralah yang pada akhirnya berperan dalam mengembangkan teknologi militer yang ada.
3. Dalam melaksanakan misi – misi rahasia tentara memiliki arti penting untuk melaksanakannya mengingat kemampuan dan fleksibilitas yang dimiliki.

²⁷ Morgenthau, *op.cit.*, hal 186 – 196.

Dari ketiga hal tersebut di atas, kita semakin jelas bagaimana posisi tentara sangat penting dan tak dapat digantikan oleh teknologi secanggih apapun yang dimiliki oleh sebuah negara.

Bila kita melihat data yang ada dari tahun ke tahun, kita bisa melihat perjalanan jumlah tentara yang dimiliki oleh Indonesia yang mendukung kekuatan militernya. Tabel 8 menunjukkan jumlah tentara yang dimiliki Indonesia dari tahun 1990 – 1998.

Tabel 8
Jumlah Tentara yang Dimiliki Indonesia Tahun 1990 – 1998

Tahun	Jumlah Tentara Aktif	Dalam Masa Pendidikan
1990	283.000	-
1991	278.000	-
1992	283.000	400.000
1993	271.000	400.000
1994	276.000	400.000
1995	274.000	400.000
1997	461.000*	400.000
1998	476.000*	400.000

* termasuk anggota POLRI

Sumber : *Military Balance* 1990 – 1991, 1991 – 1992, 1992 – 1993, 1993 – 1994, 1994 – 1995, 1995 – 1996, 1997 – 1998.

Tabel tersebut terbagi menjadi 2 bagian yang menerangkan jumlah dari tahun ke tahun serta jumlah tentara dalam masa pendidikan. Jumlah tersebut sebenarnya cukup besar dibandingkan dengan tentara yang dimiliki oleh negara – negara lain yang berada dalam kawasan Asia Tenggara.

Namun apabila kita membandingkan jumlah yang dimiliki oleh Indonesia dengan jumlah penduduk yang ada pada tahun tersebut, kita akan mendapati jumlah yang sangat kecil dimana setiap seribu penduduk dalam setiap tahunnya dilindungi oleh kurang dari 2 orang tentara. Hal ini tentu menjadi sebuah catatan penting dalam membahas tentang kekuatan militer di Indonesia. Dengan luas wilayah yang sedemikian besar kekuatan personil Indonesia kurang dari 2 tentara per seribu penduduk yang ada di Indonesia.

Setelah kita mengetahui, tentang kuantitas tentara yang merupakan pendukung kekuatan militer Indonesia, kita akan melihat bagaimana kualitas tentara yang dimiliki oleh Indonesia. Kualitas tentara ini juga sangat mendukung kekuatan militer yang dimiliki oleh sebuah negara. Sebuah negara yang memiliki kualitas tentara yang baik seperti ketrampilan yang tinggi maupun pergerakan yang cepat serta kesiapan pasukan untuk dapat diterjunkan dalam berbagai misi secara mendadak akan sangat diperhitungkan oleh negara lain.

Apabila kita melihat tentara Indonesia, sebenarnya mereka telah menjalani banyak sekali pendidikan berjenjang dalam mengupayakan terbentuknya prajurit yang handal. Di tiap – tiap angkatan dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI),²⁸ memiliki sebuah jenjang pendidikan yang beragam sesuai dengan kekhususan yang mereka pilih. Di tambah lagi di tiap – tiap angkatan perang memiliki sebuah pasukan khusus (*special force*). Angkatan Darat memiliki sebuah pasukan khusus yang diberi nama KOPASSUS yang terdiri dari 5 kelompok yaitu 2 kelompok tempur, 1 kelompok antiteroris, 1 kelompok intelejen, dan 1 kelompok perlengkapan dan perbekalan.²⁹ Sementara itu Angkatan Laut juga memiliki 12.000 marinir dimana didalamnya terdapat 1 batalyon pasukan khusus.³⁰ Hal ini tentu saja makin menguatkan posisi kekuatan militer Indonesia.

Dalam pendidikannya, tentara Indonesia juga telah mengalami berbagai latihan yang panjang. Pada tahapan awal munculnya kekuatan militer Indonesia setelah penjajahan Belanda, pendidikan di tiap – tiap angkatan berlomba – lomba untuk menunjukkan kualitasnya sehingga di setiap angkatan mengadakan jenjang pendidikannya tersendiri tanpa melakukan koordinasi dengan angkatan lain. Tercatat, pada bulan November 1945, pimpinan

²⁸ ABRI berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah runtuhnya pemerintahan Soeharto. Lapasnya Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dari tubuh ABRI menyebabkan perubahan nama tersebut. Namun dalam skripsi ini masih menggunakan istilah ABRI guna memudahkan pemhasan.

²⁹ *Military Balance 1998 – 1999*, (London : The Institute Of International Strategic Studies), hal. 182.

³⁰ *Ibid.*

Angkatan Darat (AD) membuka akademi militer di Yogyakarta dimana angkatan pertamanya diwisuda tahun 1948.³¹ Di samping di Yogyakarta, Akademi Militer juga didirikan di Tangerang, namun tidak berjalan lama.³² Sementara itu pimpinan Angkatan Laut (AL) juga mendirikan

Namun setelah lama berselang terjadi kericuhan dalam tubuh TNI karena perdebatan yang sering muncul tentang penting tidaknya mengatur pendidikan bagi Militer. Akhirnya pada tahun 1960, muncul Akademi Militer Nasional di Magelang sampai saat ini guna menyatukan pendidikan awal di samping pendidikan khusus di tiap angkatan.

Di samping pendidikan militer di dalam negeri, beberapa perwira militer juga dikirim ke luar negeri guna mengikuti pendidikan kemiliteran. AD mengirimkan perwira – perwiranya untuk mengikuti pendidikan di berbagai lembaga pendidikan di Amerika Serikat sejak tahun 1951, seperti *Command and General Staff College* di Fort Leavenworth, *Infantry School* di Fort Benning, *Field Artillery School* di Fort Sill, atau *Air Defense School* di Fort Bliss.³³ AL juga mengirimkan beberapa perwiranya untuk mengikuti pendidikan, khususnya Korps Marinir di Quantico, AS.³⁴ Sementara itu Angkatan Udara (AU) juga mengirimkan perwiranya untuk menjalani pendidikan di *Air Staff College* di Inggris.³⁵

Bila kita memperhatikan pendidikan yang panjang yang harus ditempuh oleh militer Indonesia, sebenarnya secara kualitas kekuatan tentara Indonesia tidak kalah dibandingkan dengan negara lain. Hal ini tentu saja mendukung kekuatan militer Indonesia yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kekuatan nasional Indonesia.

³¹ Sayidiman Suryohadiprojo, *Kepemimpinan ABRI Dalam Sejarah dan Perjuangannya*, (Jakarta : Intermassa, 1995), hal. 30.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.* hal. 34.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

Keunggulan kualitas militer Indonesia juga bisa dilihat dari posisinya yang cukup penting dalam pergaulan internasional. Hal ini terlihat dengan sering ditunjuknya militer Indonesia untuk ikut serta dalam berbagai misi perdamaian di bawah bendera PBB. Tercatat beberapa kali anggota militer Indonesia dikirim ke luar negeri seperti ke Irak dan Kuwait sebagai pengamat ataupun ke Somalia yang tergabung dalam UNOSOM pada tahun 1993.³⁶

Selama masa pemerintahan Soeharto, militer Indonesia juga mendominasi dalam menjaga diplomasi Indonesia ke luar negeri. Semua diplomat yang ditugaskan untuk negara – negara anggota ASEAN berasal dari kalangan militer yang ternyata ditempatkan oleh negara tersebut dalam posisi *the highest diplomatic status* (D1).³⁷

III.3.2 Penguasaan Teknologi Militer

Untuk melihat kemampuan militer di satu negara, tentu tidak akan lepas dari pembahasan mengenai teknologi militer. Menurut A. Hasnan Habib³⁸, kemampuan angkatan perang bukanlah faktor tunggal yang menentukan kemampuan pertahanan suatu negara. Hal ini didasari oleh perkembangan teknologi yang ada. Menurutnya, kemampuan menjalankan perang secara berlanjut, sebuah negara memerlukan sebuah landasan infrastruktur yang kuat yaitu infrastruktur mental psikologis dan infrastruktur industri.³⁹ Penguasaan teknologi militer oleh suatu negara merupakan sebuah upaya untuk menciptakan infrastruktur industri yang kokoh. Kemajuan teknologi yang pesat mendorong juga perkembangan teknologi militer. Ditemukannya nuklir membuat perang – perang konvensional yang melibatkan banyak tentara

³⁶ *Military Balance 1993 – 1994* (London : Institute of International Strategic Studies, 1993), hal 98.

³⁷ Dewi Fortuna Anwar, *Foreign Policy and Regionalism*, (Singapore : Institute of South East Asia Studies, 1994), hal. 136.

³⁸ Habib, *op.cit.*, hal. 44.

³⁹ *Ibid*

mulai banyak ditinggalkan. Akurasi yang tinggi dan daya hancur yang hampir tanpa batas mampu membuat sasaran – sasaran militer hancur. Ditambah lagi dengan munculnya pesawat pengintai tanpa awak yang mampu memberikan berbagai informasi seperti yang dilakukan intelejen membuat penguasaan teknologi sangat penting bagi kekuatan militer sebuah negara.

Ada beberapa motivasi yang dimiliki oleh negara berkembang untuk mengembangkan produksi militernya yaitu⁴⁰, pertama, tingkat konflik dimana negara tersebut terlibat. Makin besar keterlibatan negara tersebut, maka makin besar pula motivasi negara tersebut membangun industri militernya. Kedua, munculnya sebuah kemungkinan dimana negara – negara yang selama ini menjadi pemasok persenjataan dan peralatan militer membatasi eksportnya ke negara tersebut. Semakin sedikit negara pengekspor persenjataan militer, makin besar motivasi negara dunia ketiga untuk mengembangkan industri militernya. Ketiga, munculnya kekhawatiran akan adanya aktor lain yang berada dalam sistem internasional yang mampu mempengaruhi perilaku mereka karena perkembangan industri militer yang ada. Motivasi terakhir yang mendasari negara dunia ketiga untuk melakukan pengembangan atas industri militer adalah adanya sebuah status dan kebanggaan nasional (*national pride*).

Bagi Indonesia sendiri, nampaknya masih sulit untuk dapat menguasai teknologi militer sepenuhnya. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa negara – negara maju yang saat ini menguasai teknologi tidak mau membagikannya kepada negara – negara berkembang. Di samping itu, teknologi militer yang ada memiliki sebuah daya hancur yang sangat luar biasa dan hampir tanpa batas. Ditemukannya nuklir membuat militer sebuah negara mampu menjangkau sasaran – sasaran militer yang diinginkannya. Namun tidak hanya sasaran militer yang hancur, sasaran – sasaran non militerpun dapat hancur akibat nuklir. Kejadian ini dirasakan oleh negara maju sangat membahayakan apabila teknologi tersebut sampai jatuh ke

⁴⁰ KNDU Review Vol. 1 tahun 1996 (Seoul : Korean National Defense University, 1996), hal 286.

tangan negara – negara berkembang dan dapat memicu perang dunia yang sangat besar. Namun secara lebih terinci sebenarnya ada 3 alasan mengapa Indonesia memiliki penguasaan teknologi yang rendah dalam masalah pertahanan yaitu pertama, adanya kebijakan pertahanan yang dikeluarkan. Kebijakan pemerintah Indonesia atas industri - industri yang mendukung penyediaan senjata dan peralatan militer mulai berubah akibat adanya doktrin Hankamrata. Industri yang mendukung militer diarahkan juga untuk mendukung kebutuhan sipil yang pada akhirnya mengakibatkan tidak terfokusnya industri tersebut. Dirubahnya status Pindad, PAL dan LIPNUR menjadi perseroan terbatas menyebabkan industri militer di Indonesia tidak memiliki arah yang jelas sehingga menghambat upaya untuk mendapatkan teknologi militer yang kian hari kian canggih.

Kedua, pasar yang sangat terbatas. Industri militer di Indonesia memiliki pangsa pasar yang sangat sempit. Industri militer yang dibangun di sebuah negara sebenarnya tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, namun juga memiliki orientasi ekspor.⁴¹ Pemenuhan kebutuhan sendiri (*complete self-sufficiency*) tetap merupakan sebuah prioritas.

Hal terakhir yang menyebabkan lemahnya penguasaan teknologi militer Indonesia adalah terbatasnya sumber daya manusia yang mampu mengembangkan teknologi yang dimilikinya. Militer Indonesia harus mengirimkan orang – orangnya untuk mempelajari teknologi yang dimiliki negara lain. Beberapa orang harus dikirim ke Inggris untuk⁴² mempelajari perawatan pesawat *Hawk* yang berakitan dengan pembelian pesawat *Hawk* dari Inggris.

Bila kita melihat kekuatan industri yang mendukung militer Indonesia saat ini, paling tidak hanya ada 3 perusahaan yang dapat mendukung industri militer yaitu PT Pindad, PT.

⁴¹ Habib. *op.cit.*, hal. 116.

⁴² Indonesia mengirimkan 6 personil angkatan udara ke Cranfield University dan 13 orang dari BPPT untuk mendukung program tersebut, juga menyangkut Aircraft Stimulator and Radar Protection Task Trainer

PAL dan PT. IPTN. Ketiga perusahaan ini tidak mampu memproduksi perlengkapan ataupun senjata guna memenuhi kebutuhan militer Indonesia. Senapan – senapan serbu yang umum dipakai adalah tipe M-16A masih merupakan produk impor dari Amerika. PT. Pindad⁴³ hanya mampu memproduksi senapan – senapan ringan seperti pistol, revolver, granat tangan, ataupun senapan serbu jenis SS1-V1, SS2-V2, SS1-V3 ataupun SS1-V5.⁴⁴ Di samping senapan – senapan tersebut di atas, PT. Pindad tidak mampu memenuhi kebutuhan militer yang lain seperti tank dalam berbagai tipe, senjata – senjata berat, ataupun kendaraan – kendaraan militer dan missil.

Sementara itu dalam tubuh angkatan laut, Indonesia juga masih harus mendatangkan dari luar negeri untuk melengkapi armada perangnya. Pada tahun 1994, Indonesia mengimpor kapal perang bekas Jerman Timur yang sudah tidak dipergunakan lagi. Kapal – kapal tersebut dipakai untuk patroli di sepanjang wilayah laut Indonesia. Terdapat 16 kapal tipe *Parchim* dan 2 kapal patroli pantai tipe Gelurusan 57m (NAV II) PFC dan 3 kapal tipe (Ge Lurssen 57 NAV III) PFC.⁴⁵ Kekuatan angkatan laut Indonesia juga bisa dilihat dengan hanya dimilikinya 2 kapal selam Cakra tipe Ge T-204/1300.⁴⁶ PT. PAL⁴⁷ sendiri tidak mampu menyediakan atau memproduksi kapal – kapal perang atau kapal patroli tipe besar. PT PAL hanya mampu memproduksi kapal – kapal jenis kecil untuk patroli pantai dan kapal – kapal angkutan.

Bagi angkatan udara Indonesia, nampaknya merupakan angkatan yang paling banyak mengandalkan teknologi yang berasal dari luar negeri. Mulai dari pengadaan pesawat tempur

(RPTT), lihat Laporan Widya Karya Luar Negeri Rombongan Inggris tahun 1994 (Jakarta : Lembaga Ketahanan Nasional, 1994), hal 55 – 54.

⁴³ PT. Pindad awalnya adalah perusahaan yang khusus memproduksi berbagai senjata, amunisi dan peralatan militer yang berada di bawah Angkatan Darat. Industri ini kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 4 tahun 1983.

⁴⁴ *Brief Story of Weapon Division*, <http://www2.pindad.com/>

⁴⁵ *Military Balance 1998 – 1999* (London : Institute of International Strategic Studies, 1998), hal. 182

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ PT. PAL pada awalnya merupakan industri yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan angkatan laut Indonesia. Namun dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1988 mengubah PT PAL menjadi Perseroan dan tidak lagi memiliki fokus pada pemenuhan kebutuhan angkatan laut Indonesia.

hingga penyediaan suku cadangnya, angkatan udara Indonesia sepenuhnya bergantung pada pasokan dari luar. PT. IPTN yang merupakan industri pesawat hanya mampu memproduksi pesawat – pesawat untuk transportasi seperti CN-235, ataupun helikopter pengangkut seperti Cessna. Pada tahun 1992 untuk memenuhi kebutuhan akan pesawat tempur, Indonesia mengimpor 32 pesawat Hawk 200/single seat dan 8 buah pesawat Hawk 100/Dual seat dari Inggris.⁴⁸ Indonesia juga mengimpor pesawat jenis F-16 dari Amerika. Di samping dari Amerika dan Inggris pada tahun 1997, Menteri Negara PPN/ Ketua Bappenas, Ginanjar Kartasasmita membangun kesepakatan untuk pembelian pesawat helikopter tipe MI-17-IV dan pesawat tempur tipe SV-30K dari Rusia.⁴⁹ Tahun 1998, Departemen Pertahanan RI, memutuskan untuk membeli 600 truk militer dan *Armored Personnel Carrier* (APC) dari Korea Selatan yang ditukar dengan 8 buah pesawat CN-235 dari IPTN.⁵⁰

Melihat tersebut di atas, maka sebenarnya penguasaan teknologi militer Indonesia masih kalah dibandingkan negara – negara lain. Bahkan saat ini, Singapura merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki industri militer yang cukup maju dan mampu mengekspor barang – barang hasil produksinya ke berbagai negara.

III.3.3 Ketergantungan Militer Indonesia Terhadap bantuan Asing

Setelah kita melihat kuantitas dan kualitas tentara serta penguasaan teknologi militer Indonesia, kita akan melihat juga sejauh mana ketergantungan militer Indonesia terhadap bantuan asing. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa ketergantungan sebuah negara terhadap bantuan asing atau lingkungan eksternalnya akan membuat negara tersebut

⁴⁸ *Laporan Widya Karya Luar Negeri Rombongan Inggris tahun 1994*. (Jakarta : Lembaga Ketahanan Nasional, 1994), hal 55 – 54.

⁴⁹ *Laporan Pelaksanaan Studi Strategi Luar Negeri KRA XXXIV Lemhanas Rombongan Rusia tanggal 20 s/d 25 Agustus 2001*. (Jakarta : Lemhanas, 1998), hal.45.

⁵⁰ *Laporan Widya Wisata Luar Negeri Korea Selatan tahun 2000 Departemen Pertahanan RI*. (Jakarta : Lembaga Ketahanan Nasional, 2000), hal.50.

rentan atas berbagai dari luar. Hal ini menyebabkan tidak adanya lagi kemandirian negara tersebut akibat pengaruh yang muncul dari lingkungan eksternal karena ketergantungan yang dimiliki negara tersebut.

Dalam bidang militer, sebenarnya ada 2 bidang yang sangat penting untuk dicermati dalam kaitannya dengan ketergantungan yang dimiliki oleh sebuah negara yaitu seberapa besar pasokan senjata dan peralatan militer yang lain dari negara luar mempengaruhi, serta bagaimana bantuan negara lain berupa keuangan untuk pembiayaan militer mempengaruhi kualitas dan kuantitas kekuatan militer sebuah negara.

Bila kita melihat militer Indonesia, ketergantungan akan pasokan persenjataan dan peralatan militer dari negara lain sangat mempengaruhi kekuatannya. Ketidakmampuan militer Indonesia untuk memenuhi kebutuhan militernya dengan industri dalam negeri membuat Indonesia sangat tergantung pada pasokan dari luar. Pada tahun 1997 Indonesia harus mengimpor kendaraan lapis baja pengangkut personel dan senjata penembak jitu dari Inggris dengan total nilai import 1,6 juta dolar AS.⁵¹ Ketergantungan akan pasokan persenjataan dan peralatan militer dari luar dapat kita lihat dengan memperhatikan produk – produk militer yang dapat dihasilkan dari industri militer dalam negeri dengan kebutuhan militer Indonesia dalam meningkatkan kualitas militernya. Saat ini perusahaan yang mampu memproduksi peralatan dan perlengkapan militer di Indonesia adalah PT. Pindad. Bila kita melihat berbagai produk militer yang dihasilkan oleh PT. Pindad kita akan melihat bahwa kebutuhan militer Indonesia sangat tidak mungkin dipenuhi oleh industri militer dalam negeri. Berikut ini adalah tabel produk – produk yang dihasilkan oleh PT. Pindad :

⁵¹ *Suara Karya*, 27 September 1997.

Rifles

- A. Assault Rifles : SS1-V1, SS2-V2, SS1-V3, SS1-V5
- B. Sniper Rifle : SPR-1

Hand Gun

- A. Pistol : P-1, P-2
- B. Revolver : R1-V1, R2-V2, RG-1 (typeA), RG-2 (type C)

Law Enforcement

- A. Sabhara / Police Rifle : Sabhara V1 and Sabhara V2
- B. Forest Guard Gun
- C. Shotgun Professional Magnum
- D. Greabade Launcher
- E. Personal Body Protector

Sumber: *Brief Story of Weapon Division*, dalam <http://www2.pindad.com/> diakses tanggal 25 Desember 2001

Sementara itu, untuk kebutuhan pesawat – pesawat tempur, kekuatan militer Indonesia juga masih bergantung pada impor dari luar terutama dari negara – negara barat. Pesawat – pesawat tempur jenis Hawk dan F-16 didatangkan Indonesia dari Amerika dan Inggris. Bahkan pesawat *British Aerospace* (BAe), *Hawk* (HS Hawk) digunakan untuk latihan penerbang di tingkat lanjut.⁵²

Saat ini kekuatan pesawat tempur⁵³ angkatan udara Indonesia banyak mengandalkan pesawat – pesawat jenis tersebut. Untuk industri pesawat yang mampu disediakan dari industri dalam negeri hanyalah pesawat – pesawat untuk transportasi seperti CN-235N dan helikopter dari beberapa jenis.⁵⁴ Untuk kekuatan angkatan laut, Indonesia juga belum mampu menghasilkan kapal – kapal perang yang digunakan untuk mendukung kemampuan militernya. Kapal – kapal perang tersebut rata – rata didatangkan dari Jerman dan Belanda. Sementara itu, bantuan – bantuan militer baik dalam bentuk keuangan maupun latihan –

⁵² Chappy Hakim, *Pelangi Dirgantara*, (Jakarta : C.V Kharisma Putra Utama, 1997)., hal.25.

⁵³ Kekuatan pesawat tempur Indonesia terdiri dari 5 squadron dengan kekuatan 1 squadron terdiri dari 20 pesawat jenis A-4 (18-E, 2TA, 4H), 1 squadron pesawat F-16 (6-A, 4-B), 2 squadron dengan kekuatan 8 pesawat Hawk 109 dan 10 pesawat Hawk 209/FGA/fighter) serta 1 squadron yang terdiri dari 13 pesawat jenis Hawk Mk. 53/FGA. Untuk kekuatan lengkapnya lihat *Military Balance. loc.cit.*

⁵⁴ Pesawat ini diproduksi oleh PT. IPTN yang dahulu bernama LIPNUR

latihan militer⁵⁵ yang dibiayai oleh negara lain menjadi salah satu titik lemah ketergantungan militer Indonesia dalam upaya meningkatkan kemampuan militernya. Ketergantungan pada bantuan – bantuan militer yang diberikan dari negara lain pada akhirnya akan berbalik menjadi bumerang bagi Indonesia bila suatu saat bantuan tersebut dihentikan. Keterampilan yang didapat dalam setiap latihan militer yang dibiayai oleh negara lain di satu sisi sangat mendukung kemampuan militer Indonesia dalam menjaga kekuatannya untuk dapat melakukan perang yang berkelanjutan namun di sisi lain bila Indonesia tidak cermat mensiasatinya akan berakibat ketergantungan yang semakin dalam.

Bila kita melihat kenyataan yang ada sampai saat ini, pembelanjaan militer Indonesia sebenarnya jumlahnya cukup besar. Bila kita melihat data yang ada total jumlah biaya belanja militer dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tabel 9 menunjukkan jumlah biaya belanja militer yang dikeluarkan Indonesia dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1997.

Tabel 9

**JUMLAH BIAYA PEMBELANJAAN MILITER INDONESIA
TAHUN 1991 - 1997**

Tahun	Jumlah (milyar dolar)
1	2
1991	1,5
1992	1,8
1993	2,03
1994	4,4
1996	4,7
1997	4,8

**sumber : Military Balance 1991-1992, Military 1992-1993, Military 1994-1995, Military 1996-1997, (London: Institute of International Strategic Studies)*

⁵⁵ Latihan militer yang dimaksudkan di sini adalah latihan militer yang sepenuhnya dibiayai dan diprakarsai oleh negara lain. Latihan – latihan militer dalam bentuk kerjasama lebih merupakan upaya politis untuk dapat membangun rasa saling percaya antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Dari jumlah tersebut Indonesia pada tahun 1997 menempati peringkat 25 dari 30 negara yang memiliki pembelanjaan militer terbesar di dunia. Tabel berikut ini menunjukkan 30 negara dengan pengeluaran pembelanjaan militer terbesar.

Tabel 10
30 Negara Dengan Belanja Militer Terbesar

No	Negara	Dalam juta dolar
1	2	3
1.	United States	276,300
2.	China, People's Rep. Of	74,910
3.	Russia	41,730
4.	France	41,520
5.	Japan	40,848
6.	United Kingdom	35,240
7.	Germany	32,870
8.	Italy	22,720
9.	Saudi Arabia	21,150
10.	Suth Korea	15,020
11.	Brasil	14,150
12.	Taiwan	13,060
13.	India	10,850
14.	Israel	9,335
15.	Australia	8,463
16.	Canada	7,800
17.	Turkey	7,742
18.	Spain	7,670
19.	Netherlands	6,834
20.	North Korea	6,000
21.	Singapore	5,664
22.	Polandia	5,648
23.	Sweden	5,550
24.	Grece	5,533
25.	Indonesia	4,812
26.	Iran	4,722
27.	Mexico	4,299
28.	Ukrain	4,285
29.	Switzerland	3,859
30.	Argentina	3,701

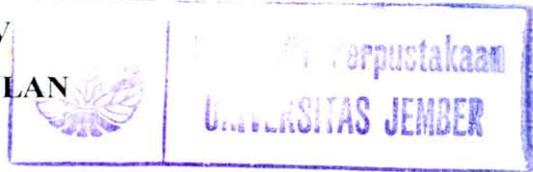
* Sumber : US Arms Control and Disarmament Agency, *World Military Expenditures and Arms Transfer, 1998* dalam <http://www.fas.org/man/docs/wmeat48/wmeat98fs.html> diakses tanggal 25 Desember 2001.

Bila kita perhatikan lebih teliti lagi, negara – negara yang memiliki pengeluaran militer besar memiliki sebuah industri militer yang cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan militernya.

Namun dalam kasus Indonesia, nampaknya anggaran yang disediakan belum dapat mencukupi kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan militernya. Secara kumulatif, pengeluaran militer Indonesia memang termasuk dalam 25 besar negara – negara dengan pengeluaran militer terbesar, namun bila kita membandingkannya dengan total penegeluaran pemerintah Indonesia, penegeluaran untuk belanja militer Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan negara lain. Singapura adalah sebuah contoh negara di Asia Tenggara yang kecil dengan pengeluaran biaya belanja militer yang cukup besar. Namun Singapura memiliki industri militer yang cukup kuat, bahkan termasuk negara yang mampu menjadi pemasok senjata dan peralatan militer bagi negara lain.

Indonesia banyak dibantu oleh negara – negara barat terutama Amerika dengan diadakannya latihan – latihan militer yang didapat secara cuma – cuma. Bahkan Amerika telah memiliki sebuah program bantuan latihan militer dengan Indonesia guna meningkatkan kemampuan tempur personilnya secara berkelanjutan. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi Indonesia, karena di samping menghemat biaya juga dapat meningkatkan kemampuan militer Indonesia dalam mengenal peralatan militer yang berteknologi canggih. Namun di samping keuntungan yang didapatkan, Indonesia juga pada akhirnya mengalami sebuah ketergantungan bagi peningkatan kualitas personil militernya kepada Amerika.

Dari paparan tersebut di atas, nampak bahwa ketergantungan militer Indonesia masih sangat besar kepada negara lain. Pasokan persenjataan dan peralatan militer dari negara lain menjadi dominan dalam kemampuan militer Indonesia. Di samping itu, karena biaya pembelanjaan militer yang rendah, maka militer Indonesia banyak mengandalkan bantuan – bantuan dari negara lain untuk meningkatkan kemampuan personil militernya lewat latihan – latihan militer yang dibiayai negara lain.

BAB V
KESIMPULAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu isu yang mulai terinternasionalisasi. Penegakkan HAM saat ini bukan saja menjadi perhatian sekelompok negara saja, namun juga seluruh negara di dunia. Berbagai permasalahan HAM yang ada di suatu negara tertentu, kini seakan – akan juga telah menjadi bagian dari persoalan negara lain. Permasalahan HAM di dunia sudah mulai lepas dari batas – batas wilayah suatu negara.

Bagi Indonesia sendiri, permasalahan mengenai penegakan HAM juga tidak lepas dari perhatian dunia internasional. Sehingga berbagai kebijakan atas HAM juga tidak dapat dilepaskan begitu saja dari tekanan dunia internasional. Pengaruh tekanan internasional atas pemerintahan otoriter Soeharto untuk membuat berbagai kebijakan guna menjamin penegakan HAM sangat terasa. Mulai dari pembuatan lembaga pengawas HAM hingga pembuatan peraturan atau ratifikasi konvensi internasional tentang HAM serta pembentukan tim – tim penyelidik guna mengusut secara tuntas berbagai pelanggaran HAM yang terjadi tidak dapat lepas dari pengaruh internasional yang ada.

Pengaruh tekanan internasional yang dilakukan meliputi 2 bidang yaitu bidang militer dan bidang ekonomi. Hal ini mengingat bahwa dalam kedua bidang inilah Indonesia memiliki banyak ketergantungan pada pihak dunia internasional yang pada akhirnya merupakan titik lemah Indonesia untuk dapat mengeluarkan kebijakan HAM secara mandiri. Ketergantungan atas bantuan luar negeri dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia serta pasokan persenjataan dan peralatan dari luar negeri guna menjamin kekuatan militernya merupakan contoh bagaimana rentannya kekuatan nasional Indonesia atas intervensi dari lingkungan eksternalnya.

Lebih lanjut lagi, pada masa pemerintahan Soeharto dari antara 2 bidang yang menjadi fokus tekanan internasional guna penegakan HAM di Indonesia, nampaknya bidang ekonomi menjadi sangat dominan dan memiliki pengaruh yang paling besar. Hal ini disebabkan karena sektor perekonomian merupakan sektor yang paling sensitif serta menjadi suatu legitimasi bagi pemerintahan Soeharto sehingga hal ini menyebabkan pengaruh tekanan internasional dirasakan paling besar dampaknya. Di samping itu pula, tekanan dalam bidang

militer tidak pernah dibarengi oleh aksi intervensi langsung yang melibatkan kekuatan militer dari negara lain secara fisik. Tekanan militer hanya mengambil bentuk embargo atau berbagai pelarangan senjata.

Dari berbagai hal di atas, sebenarnya kita dapat menyimpulkan bahwa tekanan internasional sangat berpengaruh bagi kemandirian Indonesia dalam pembuatan kebijakan HAM. Indonesia tidak mampu memunculkan dirinya sebagai negara yang mandiri dalam permasalahan HAM sekalipun Indonesia sudah mensosialisasikan pandangan – pandangannya sendiri. Hal ini disebabkan tidak adanya dukungan kekuatan nasional guna menjaga Indonesia dari berbagai intervensi yang dilakukan oleh lingkungan eksternalnya yang memaksakan agenda penegakkan HAM di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Dewi Fortuna, 1994. *Foreign Policy and Regionalism*, (Singapore : Institute of Southeast Asia Studies)
- Arikunto, Sukarsini, 1989. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Bina Aksara)
- Benedanto, Pax dan M. Mahendra, 2000. *Konvensi Anti Penyiksaan, Panduan Bagi Jurnalis*, (Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan)
- Budiardjo, Mirriam, 1993. *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama)
- _____, 1996. *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Parlementer*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama)
- Clelland, Charles Mac, 1989. *Ilmu Hubungan Internasional, Teori dan Sistem*, (Jakarta : PT. Rajawali Press)
- Coplins, William D, 1992. *Pengantar Politik Internasional, Suatu Telaah Teoritis*, (Jakarta : CV. Sinar Baru)
- Fatah, R. Eep Saefulloh, 1996. *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia)
- Hakim, Chappy, 1997. *Pelangi Dirgantara*, (Jakarta : CV. Kharisma Putra Utama)
- Hanlon, Michael O, 1997. *Saving Lives With Force, Military Criteria For Humanitarian Intervention*, (Washington DC : The Brookings Institution)
- Haryanto, Igantius.et.al,2000 *Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Panduan Bagi Jurnalis*, (Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan)

- Habib, A. Hasnan, 1997. *Kapita Selekta : Strategi dan Hubungan Internasional*, (Jakarta : Center for Strategic and International Studies)
- Holsti, K.J, 1988. *Politik Internasional, Sebuah Kerangka Untuk Analisis, Jilid I*, (Jakarta : Penerbit Erlangga)
- _____, 1988. *Politik Internasional, Sebuah Kerangka Untuk Analisis, Jilid II*, (Jakarta : Penerbit Erlangga)
- Irwan, Alexander, 1999. *Jejak - Jejak Krisis di Asia*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius)
- Kartika, Sandra dan Sapto Yunus, 2000. *Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. (Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan)
- Kartono, Kartini, 1981. *Pengantar Metodologi Research* (Jakarta : CV. Rajawali Press)
- Kelsay, John dan Summer B. Twiss, 1997. *Agama dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : Institut Dian / Interfidei)
- Masoed, Mohtar, 1989. *Ilmu Hubungan Internasional*,(Jakarta : LP3ES)
- Morgenthau, Hans. J, 1990. *Politik Antar Bangsa*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia)
- Nasution, Dahlan, 1991. *Politik Internasional Konsep dan Teori*, (Jakarta : Penerbit Erlangga)
- Nickel, James W, 1996. *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis Atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama)
- Pangestu, Mari (ed), 1997. *Mencari Paradigma Baru Pembangunan Indonesia*, (Jakarta : Center for Strategic and International Studies)
- Rahman, Arifin. 1998. *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional*, (Surabaya : Penerbit SIC)
- Sarsito, Totok. 1993. *Teori Realisme Politik Internasional (Hans J. Morgenthau), Suatu Analisis dan Kritik*, (Surakarta : Sebelas Maret University Press)

Suryabrata, Sumardi, 1983. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : CV. Rajawali Press)

Suryadinata, Leo, 1998. *Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto*, (Jakarta : LP3ES)

Suryohadiprodo, Sayidiman, 1995. *Kepemimpinan ABRI Dalam Sejarah dan Perjuangan*, (Jakarta : Intermassa)

Syahrir, 1995. *Meramal Ekonomi di Tengah Keidakpastian*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama)

Viotti, Paul V, 1987. *International Relation Theory Realism, Pluralism, Globalism* (New York : Mac Millan Publishing)

Jurnal

Basri, Faisal H, "Krisis Ekonomi di Tengah Gelombang Globalisasi : Implikasinya Bagi Kerjasama Ekonomi di Asia Pasific", dalam *Analisis CSIS tahun XXVIII 1999 no 1* (Jakarta : Center for Strategic and International Studies,1999)

Djelantik, Sukawarsini, "Diplomasi Hak Asasi Manusia Kasus Indonesia dengan Timor - Timur", dalam *Analisis CSIS tahun XXIX 2000 no 2* (Jakarta : Center for Strategic and International Studies,2000)

Fitriani, Evi, "HAM di Eropa", dalam *Global Jurnal Politik Internasional, September 2000* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia)

Kuncoro, Mudradjad, "Indonesia Menjelang Tahun 2000, Sebuah Renungan" dalam *Analisis CSIS tahun XXII no 2 Maret - April 1993* (Jakarta : Center for Strategic and International Studies,1993)

Lubis, T Mulya, "Perdebatan Hak Asasi Manusia Akhir - akhir Ini : Beberapa Catatan Kritis", dalam *Analisis CSIS tahun XXII no 5 September - Oktober 1993* (Jakarta : Center for Strategic and International Studies, 1993)

Prasetyo, Edy, "Hak Asasi Manusia Dalam Hubungan Internasional", dalam *Analisis CSIS tahun XXII no 2 Maret – April 1993* (Jakarta : Center for Strategic and International Studies, 1993)

Smith, Anthony, "Indonesia's Role in ASEAN : The End of Leadership", dalam *Contemporary South East Asia Volume 21 no 2 Agustus*

Subiyanto, Laundry Haryo, "Perspektif HAM Dalam Diplomasi RI : Tantangan dan Peluang Bagi Pemerintahan Abdurrahman Wahid", dalam *Analisis CSIS tahun XXIX / 2000 no 2* (Jakarta : Center for Strategic and International Studies, 2000)

Suryadinata, Leo, "Islam and Soeharto's Foreign Policy", dalam *Asian Survey Volume XXXV no 3 Maret* (California : University of California, 1995)

Wuryandari, Ganewati, "Hak Asasi Manusia Dan Politik Luar Negeri Indonesia", dalam *Analisis CSIS tahun XXVIII / 1999 no 2* (Jakarta : Center for Strategic and International Studies, 1999)

Terbitan

Final Report, *Diplomasi Indonesia di Bidang HAM Dalam Kaitannya Dengan Vienna Declaration and Program of Action, Juni 1993*. 1998, (Jakarta : Kerjasama PACIS dan Balitbang Deplu)

Human Right, Question and Answer, 1987. (New York : United Nation)

Military Balance 1990 - 1991, (London : The Institute of International Strategic Studies, 1991)

Military Balance 1991 - 1992, (London : The Institute of International Strategic Studies, 1992)

Military Balance 1992 - 1993, (London : The Institute of International Strategic Studies, 1993)

Military Balance 1993 - 1994, (London : The Institute of International Strategic Studies, 1994)

Military Balance 1994 - 1995, (London : The Institute of International Strategic Studies, 1995)

Military Balance 1995 - 1996, (London : The Institute of International Strategic Studies, 1996)

Military Balance 1996 - 1997, (London : The Institute of International Strategic Studies, 1997)

Military Balance 1997 - 1998, (London : The Institute of International Strategic Studies, 1998)

Military Balance 1998 - 1999, (London : The Institute of International Strategic Studies, 1999)

Laporan

Amnesty International Report 1992, A Comprehensive Report on Human Right Violation Around The World (UK : Amnesty International Publication, 1993)

Laporan Pelaksanaan Widya Wisata Luar Negeri Rombongan Prancis tahun 1995 (Jakarta : Lembaga Ketahanan Nasional, 1995)

Laporan Pelaksanaan Widya Karya Luar Negeri Rombongan Inggris tahun 1998 (Jakarta : Lembaga Ketahanan Nasional, 1998)

Laporan Pelaksanaan Widya Wisata Rombongan AS tanggal 11 s/d 25 Agustus 1995, Ringkasan Eksekutif (Jakarta : Lembaga Ketahanan Nasional)

Laporan Widya Wisata Rombongan Jepang tahun 1996 (Jakarta : Lembaga Ketahanan Nasional)

Laporan Tahunan 1994 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Laporan Tahunan 1996, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

SURAT KETERANGAN PELAKSANAAN RESEARCH

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa.

Nama : A. Ananto Nugroho

Status : Mahasiswa

Alamat : Jl. Jawa VII / 34 B Jember

telah melaksanakan research/survey pada Perpustakaan
Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
dalam bidang:

Pengaruh Tekanan Internasional Terhadap
Kebijakan Indonesia Atas HAM Masa Peme-
rintahan Soeharto (1991 - 1993)

untuk keperluan penyusunan skripsi.

Demikian agar yang bersangkutan menjadi maklum.

Jakarta, 1 - 11 20 01



Soedarso
Kepala Perpustakaan

Koran / Majalah

Bisnis Indonesia, 3 April 1998

Kompas, 12 April 1998

Suara Karya, 27 September 1997

Situs Internet

Brief Story of Weapon Division, dalam <http://www2.pindad.com/>

Tabel Data Pembiayaan Pengeluaran Pembangunan 1990/1991 – 1998/1999, dalam <http://www.depkeu.go.id/indonesia/tabel.html>

Sejarah Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam <http://www.komnas.go.id/indonesia/archieve/komnas/index.html>

Sudarsono Juwono, *Human Rights : An Indonesia View*, dalam <http://www.deplu.go.id/policy/view/humanrights/paper/foreign.html>.



PUSAT DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN

BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI
JLN TAMAN PEJAMBON NO. 4 (EX. BP 7)
JAKARTA PUSAT

SURAT KETERANGAN RISET

NOMOR:148/RIS/PERPUST/ XI/ 2001/52

Menunjuk Surat Pengantar Riset Nomor : 1289/J25.3.1/PL.5/2001 dari
Universitas Jember Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,

Bersama ini kami menerangkan bahwa :

N a m a : A Ananto Nugroho
NIRM. : 97-1185
Fakultas/Jurusan : Hubungan Internasional

Telah mengadakan riset/penelitian di Pusat Dokumentasi dan Perpustakaan Badan
Litbang Departemen Luar Negeri Jakarta selama 1 (satu) hari dalam rangka penyusunan
skripsi yang berjudul :

**“Pengaruh Tekanan Internasional Terhadap Kebijakan Indonesia Atas Ham Masa
Pemerintahan Soeharto Tahun 1991-1998”**

Demikianlah Surat Keterangan Riset ini kami berikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 Nopember 2001

A.n. Kepala Bidang Perpustakaan,
Kantor Bina Pemeliharaan Koleksi

